

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERASING
DI PEGUNUNGAN MERATUS
KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



Oleh:
Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Dr. Zainal Fikri, M.Ag, MA.

Penelitian ini Dibiayai dari Dana DIPA
IAIN Antasari Banjarmasin
Tahun 2016

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PENELITIAN
BANJARMASIN
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Illahi Rabbi, karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dengan baik program ini dengan judul: Pemberdayaan Masyarakat Terasing di Pegunungan Meratus Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pelaksanaan program ini terselenggara dengan dukungan dari Hibah Dana DIPA Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat IAIN Antasari Tahun 2016. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada:

1. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Kemenag Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
7. Pihak terkait yang belum disebutkan yang juga turut membantu terlaksananya program ini.

Kami berharap hasil program ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang relevan, agar dapat berfungsi secara efektif, bermanfaat untuk institusi juga masyarakat akademik dan masyarakat pada umumnya.

Banjarmasin, Desember 2016
Ketua,

Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA
NIP. 19551223 198203 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Nama Program	9
C. Tujuan Program	10
D. Manfaat Program	11
E. Definisi Konsep	12
a. Pemberdayaan Masyarakat	12
b. Masyarakat Terasing Pegunungan Meratus Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan	20
c. Ekoreligi	27
E. Metode Program	29
a. Metode dan Langkah-Langkah Kegiatan	29
b. Tempat Kegiatan	32
c. <i>Tools</i>	32
d. Pengorganisasian	33

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kec. Loksado	34
B. Gambaran Umum Desa Tumingki	37
1. Kondisi Jalan Desa	38
2. Kondisi Tanah Desa	39
3. Kondisi Sumber Air Desa	39
4. Kondisi Penerangan Desa	40
4. Kondisi Sumber Daya Manusia di Desa Tumingki	40

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Potensi-Potensi Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, dan Lingkungan Alam yang dimiliki	43
1. Sosial Budaya	43
a. Budaya Kekeluargaan dan Kekerabatan	43
b. Budaya Pemanfaatan Hutan dan Pelestariannya	46
c. Budaya Kepemimpinan dan Pemerintahan	48
2. Sosial Ekonomi	49
3. Lingkungan Alam	51
B. Sektor-Sektor Perekonomian yang Dapat Dikembangkan Dalam Aspek Ekoriligi untuk Kesejahteraan Hidup Orang Meratus	54
C. Pemetaan Terhadap Usaha yang Telah Dilakukan <i>Stake Holders</i> dalam Membangun	

Masyarakat Terasing dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Kehidupan Orang Meratus	60
1. Lembaga-Lembaga Penunjang di Desa Tumingki	60
2. Prasarana dan Sarana di Desa Tumingki	63
D. Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Potensi Desa Terhadap Pelestarian dan Revitalisasi <i>Traditional Wisdom</i> serta <i>Local Knowledge</i>	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran/Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Peta Pegunungan Meratus	22
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Loksado dengan Wisata Air Terjun	34
Gambar 2.2 Sketsa Desa Tumingki Tahun 2016	37
Gambar 3.1 Balai Adat Aitih Desa Tumingki	44
Gambar 3.2 Balai Adat Haruyan Desa Tumingki	44
Gambar 3.3 Balai Adat Tanginau Desa Tumingki	45
Gambar 3.4 Suasana dalam Balai Adat Suku Dayak	45
Gambar 3.5 Potensi Tambang Bijih Besi	53
Gambar 3.6 Bangunan Kelompok Bermain “Tumingki Ceria”	61
Gambar 3.7 Bangunan SDN Tumingki 1	62
Gambar 3.8 Bangunan SDN Tumingki 2	62
Gambar 3.9 Jalan Desa Menuju Balai Haruyan	64
Gambar 3.10 Jalan Keluar dari Desa Tumingki	64
Gambar 3.11 Papan Arah ke Desa Tumingki	65
Gambar 3.12 Gedung Kantor Desa Tumingki	68
Gambar 3.13 Mushalla yang Berada di Tumingki 2, Merupakan Hibah dari Satu-Satunya Keluarga yang Beragama Islam	72
Gambar 3.14 Keadaan Ruang Mushalla Tumingki 2	72

Gambar 3.15 Mushalla di Tumingki 1	73
Gambar 3.16 Mushalla di Lambuk	73
Gambar 3.17 Gereja Pantai Binuang	74
Gambar 3.18 Gedung POSKESDES Tumingki	76

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Luas Wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kelas Ketinggian Dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan (Ha)	21
Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kec. Loksado	35
Tabel 2.2 Data Penduduk Kec. Loksado Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	35
Tabel 2.3 Data Klasifikasi dan Luas Wilayah Pertanahan Desa Tumingki	39
Tabel 2.4 Data Pendidikan Penduduk Desa Tumingki	40
Tabel 2.5 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tumingki	44
Tabel 3.1 Data Peternakan di Desa Tumingki	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“*Orang Bukit*” adalah kata sederhana untuk menyatakan bagian etnis dari Masyarakat Adat Suku Dayak yang berdiam dalam wilayah Pegunungan Meratus di Propinsi Kalimantan Selatan, yang disebut juga dengan sebutan Orang Dayak Meratus (YADAH, 2002: 3).

Suku Dayak Bukit di Kalimantan Barat berbeda dengan Suku Dayak Meratus atau Orang Bukit di Kalimantan Selatan yang sering disebut juga dengan nama yang sama yaitu Suku Dayak Bukit atau Suku Melayu Bukit yang menurut sensus penduduk Indonesia tahun 2000 disebut dengan Suku Bukit saja (https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Dayak_Bukit).

Orang Bukit atau orang Dayak Meratus mendiami kawasan hutan lindung di kabupaten Hulu Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Laut, dan Kotabaru. Pada tahun 1979, kelompok tersebut memiliki populasi sekitar 12.000-15.000 jiwa yang berdiam dalam 10 desa utama. Di dalam mitologi Orang

Bukit dan Orang Banjar Pahuluan di daerah Tapin dan Hulu Sungai Selatan ditemukan bahwa kelompok tersebut berasal dari keturunan anak cucu dari Dayuhan atau Palui Tuha dan Intingan atau Palui Anum. Keturunan anak cucu Intingan memeluk agama Islam dan keturunan anak cucu Dayuhan memilih bermigrasi ke daerah pegunungan. Kelompok tersebut sebagai pioneer membangun desa Mencabung, Harakit, Belayawan, dan Danau Darah di Kabupaten Tapin. Sedangkan keturunan anak cucuk dari Intingan memilih untuk membangun mesjid di Benua Halat, Parigi, Gadung, dan Lokpaikat. Keturunan Dayuhan tersebut yang diyakini sebagai Orang Bukit sekarang yang mendiami kawasan Pegunungan Meratus (Wahyudin, 1999).

Ras (1968) menyatakan bahwa pada permulaan abad pertama masehi di daerah Tanjung terdapat konsentrasi koloni Melayu tertua yang bermigrasi dari Indonesia Barat. Saleh (1978) menyatakan koloni orang-orang Melayu ini di zaman Sriwijaya bermigrasi ke Kalimantan Selatan, diperkirakan sekitar tahun 1025 atau 1026 ketika Selat Malaka diserang Armada Colamandala. Pembauran pertama antara Orang Melayu dengan kelompok Orang Bukit, Aba, Deyah, dan Lawangan sudah terjadi sebelum

abad ke-12. Kelompok tersebut berhasil mendirikan kerajaan Tanjung Puri, sehingga Orang Bukit sebagai penduduk asli diperkirakan sudah ada dan mendiami area pegunungan Meratus sebelum abad ke-12.

Secara tradisional Orang Bukit mendiami daerah-daerah hulu sungai Pitap cabang sungai Balangan di Kabupaten Balangan, daerah sungai Alai atau Batang Alai dan sungai Labuan Amas di Hulu Sungai Tengah, di Hulu Sungai Amandit di Hulu Sungai Selatan, daerah Hulu Sungai Tapin di kabupaten Tapin, sungai Riam Kiwa di kabupaten Banjar, dan hulu sungai Sapanahan di kabupaten Kotabaru. Komunitas Orang Bukit Meratus bertempat tinggal berkelompok pada sebuah balai atau rumah panjang atau beberapa pondok di sekitar balai tersebut (*compound*). Namun akhir-akhir ini sudah mulai banyak Orang Bukit Meratus mendirikan rumah-rumah agak jauh dari balai adat, yakni di pinggir jalan-jalan raya atau di perkampungan tertentu membaur dengan komunitas lainnya khususnya komunitas Banjar Hulu.

Mata pencaharian utama Orang Bukit adalah bertani terutama berladang padi di daerah pegunungan. Selain itu kelompok tersebut juga memanfaatkan hasil hutan seperti kayu manis, kemiri, dan bambu. Dalam sistem sosial

budaya Bukit, wujud tekno ekonomi pertanian yang paling nyata dan paling banyak memberi warna kehidupan dalam keseharian adalah sistem pertanian berladang. Sistem pertanian ini tidak dilakukan secara menetap dan terus menerus di suatu tempat, melainkan berpindah-pindah. Setelah suatu lahan dimanfaatkan untuk beberapa kali periode tanaman dan tanah dirasakan tidak subur lagi untuk periode tanaman berikutnya peladang akan berpindah ke lahan lain atau lahan baru. Sementara itu, lahan yang lama ditinggalkan, setelah selang waktu sekitar 15-20 tahun, berladang dilakukan lagi di lahan semula. Karena ditinggalkan dan dibiarkan, maka lahan ini akan dijumpai lagi dalam keadaan telah menjadi hutan kembali. Pertanian dengan cara menebang hutan, membakar dan membersihkannya, kemudian ditanami padi-padian, dan tumbuhan lainnya sebagai varian tumbuhan ladang, di dunia ilmiah sering disebut sebagai “*Slash and Burn Agriculture*” atau “*Swedden Agriculture*” atau “*Shifling Cultivation*” sesuai dengan teknik yang dipakai untuk bertanam.

Aktivitas berladang dalam sistem budaya *huma* Orang Bukit tidak dapat dipisahkan dari sistem religi masyarakat tersebut. Bahkan dapat dikatakan, religi Orang Bukit

Meratus didasari oleh sebuah sistem keyakinan dan ritual yang bersumber dari sistem ekonomi berladang yang berpusat pada pemuliaan padi sebagai makanan pokok dalam bingkai ekosistem perbukitan yang arif dan integral. Dalam pola perladangan “*bahuma*” masyarakat Bukit Meratus banyak ritual yang dilakukan yang didasari oleh kepercayaan yang dianut untuk mengiringi aktifitas pola hidup ekonomi dalam sistem pertanian kelompok tersebut. Keyakinan religi dan ritual-ritual tersebut bila diperhatikan dengan seksama akan menggambarkan kerajinan tradisional masyarakat Bukit terhadap alam sekitar dan tatanan sosial yang harmonis. Diantara ritual dimaksud adalah minta izin kepada pemilik tanah, *batanung*, mencari alamat *guring*, *bamula*, *mangatam*, *manyimpan banih* dan lain-lain. Selain itu juga dikenal ritual *batilah*, *marandahkan balai diyang sanyawa*, dan *manyangga banua*.

Secara Sosio-Antropologis, perilaku sosial memperlakukan lingkungan hidup yang bereferensi pada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang telah disepakati bersama sebagai *The Way of Doing and Thinking*. Tidak mengherankan jika di dalamnya terkandung seperangkat pandangan dan kepercayaan yang diyakini sebagai sesuatu kebenaran tertinggi, yang ditempatkan sebagai perekat

solidaritas sosial yang menjadi dasar menjaga keteraturan sosial dan menjaga equilibrium alam.

Keajegan ekologis dan kearifan tradisional ini sudah terganggu dengan hadirnya aktor-aktor dan lembaga-lembaga modernitas yang telah melakukan eksploitasi alam secara serakah di bawah jaminan negara. Sejak tahun 1970-an bumi pegunungan Meratus telah didatangi aktor-aktor kapitalistik pembabat hutan melalui penguasaan HPH (Hak Penguasaan Hutan). Kemudian terus berkembang aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan-lahan perkebunan berskala besar. Pada akhirnya kerusakan lingkungan hidup tidak bisa terhindarkan, dimana unsur-unsur yang membentuk lingkungan hidup atau ekosistem sudah tidak berfungsi dengan baik. Kerusakan lingkungan tersebut berakibat parah terhadap kelangsungan hidup manusia saat ini bahkan kehidupan di masa depan. Dengan rusaknya ekologis, masyarakat mulai kekurangan air, suhu udara yang panas, kebakaran hutan, kemarau panjang, banjir bandang, tercemarnya udara dan air, dan sebagainya yang membuat kenyamanan hidup menjadi terganggu dan tidak aman baik secara biologis (kesehatan) maupun sosial.

Tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada masyarakat tradisional seperti Orang Bukit sebagai perusak hutan dan penyebab kebakaran hutan sungguh tidak beralasan dan tidak objektif. Kecendrungan peningkatan persentasi kerusakan hutan jika dicermati ternyata sejalan dengan berkembangnya dunia industri kehutanan, kawasan transmigrasi, perkebunan, perluasan areal tanaman padi dan pertambangan. Selama ini masyarakat lokal atau masyarakat tradisional tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengoperasian industri kehutanan. Bahkan lebih ironis lagi kelompok tersebut tidak pernah dilibatkan dalam pemeliharaan dan pembangunan kembali hutan. Padahal masyarakat asli yang menempati hutan tersebut telah hidup ratusan tahun secara turun temurun menyatu dengan alam berlandaskan sistem kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma serta perilaku hidup yang arif dan bersahabat dengan hutan. Kelompok tersebut memiliki sistem kearifan ekologis yang khas bersumber dari sistem kepercayaan ekoreligi yang berfungsi menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Kelompok tersebut mampu beradaptasi dalam tatanan keseimbangan mikro-makrokosmos secara penuh dalam bingkai sistem sosio-budaya kearifan Meratus.

Masyarakat Meratus sebagai bagian dari warga negara RI telah lama mengalami proses marginalisasi, baik secara sosial maupun struktural. Secara faktual sangat sedikit Orang Bukit yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal, bahkan pendidikan dasar sekalipun. Angka buta huruf masih tinggi dan akses pendidikan sangat rendah. Kondisi sosial sangat miris disaksikan seperti rendahnya pendidikan, kemiskinan, kesehatan, layanan ibu hamil dan melahirkan, kesehatan balita, gizi anak dan keluarga dan sebagainya. Kondisi sosial ini makin diperparah dengan problem kerusakan lingkungan secara masif, sehingga kelompok tersebut kehilangan masa depan dan ancaman kehidupan yang buruk.

Problema sosial dan ekologis yang menghimpit masyarakat Meratus tersebut tidak boleh dibiarkan. Kelompok tersebut adalah bagian dari anak-anak bangsa dan warga negara yang memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Pemiaran terhadap masa depan kehidupan kelompok tersebut adalah bentuk pelanggaran dari amanat konstitusional negara Pancasila dalam melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, maka upaya-upaya strategis dan sinergis perlu dilakukan dalam rangka

menyelamatkan ekologis dan kehidupan sosial masyarakat Meratus. Pilar penyelamatan pertama yang harus dilakukan adalah merivitalisasi modal sosial budaya Orang Meratus melalui aksi ekoreligi secara sistematis dan integral. Melalui program ekoreligi diharapkan memiliki implikasi tumbuhnya kesadaran baru penyelamatan lingkungan secara internal dan aksi-aksi kolektif menghadapi kekuatan eksternal eksploitatif lingkungan secara cerdas dan sistematis.

B. Nama Program

Program ini diberi nama: “Pemberdayaan Masyarakat Terasing Di Pegunungan Meratus Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Program ini didasarkan kepada pengembangan masyarakat (*Community Based Development*) secara sistematis dan integral dengan mengakomodasikan modal sosial dan budaya Orang Meratus. Diarahkan guna memberdayakan potensi-potensi sosial budaya secara efektif dalam memecahkan masalah ekologis dan sosial yang dihadapi secara integral dan berkesinambungan.

C. Tujuan Program

Secara umum, program ini bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi sosial budaya yang bertumpu pada tiga pilar utama (pendidikan, ekonomi, dan religi) yang maju dan berkeadaban pada masyarakat Meratus dalam bingkai kelestarian hutan dan ekosistem lainnya secara holistik.

Secara khusus kegiatan ini merupakan tahap awal dari suatu program yang berkesinambungan yang bertujuan untuk:

1. Menggali potensi-potensi sosial budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan alam yang dimiliki.
2. Menganalisis sektor-sektor perekonomian yang dapat dikembangkan dalam aspek Ekoreligi untuk kesejahteraan hidup Orang Meratus.
3. Melakukan pemetaan usaha yang telah dilakukan *stake holder* dalam membangun masyarakat terasing dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan kehidupan Orang Meratus.
4. Merumuskan strategi dalam upaya meningkatkan potensi desa terhadap pelestarian dan revitalisasi *traditional wisdom* serta *local knowledge*.

D. Manfaat Program

Manfaat program yang didapat dari pelaksanaan serangkaian kegiatan ini yaitu:

1. Didapatkan informasi tentang potensi-potensi sosial budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan alam yang dimiliki.
2. Didapatnya informasi dari analisis sektor-sektor perekonomian yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan hidup orang Meratus.
3. Adanya *blue print* pemetaan yang telah dilakukan *stake holders*.
4. Adanya rekomendasi kepada *stake holder* tentang strategi upaya peningkatan pelestarian dan revitalisasi *traditional wisdom* dan *local knowledge*.
5. Terbentuknya institusi sosial budaya komunitas-komunitas pembelajaran pada masyarakat Meratus dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.
6. Terbangunnya institusi sosial ekonomi ke dalam kelompok-kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat Meratus sebagai mekanisme kontrol harga dan akses pasar hasil-hasil kehutanan yang berkeadilan menuju masyarakat yang sejahtera.

7. Teraktulisasikannya aksi-aksi kolektif penyelamatan dan pengelolaan hutan secara sistematis.
8. Terwujudnya revitalisasi modal sosial budaya (religi) guna menyangga perubahan sosial, kebijakan sosial yang tidak adil, dan kerusakan lingkungan Orang Meratus.

E. Definisi Konsep

a. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan diadaptasi dari kata *empowerment* yang gaungnya mulai dikenal pada masa abad pertengahan di Eropa. Ife (1995) mendefinisikan tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu:

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individualsto compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on.

Definisi pemberdayaan masyarakat menurut Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) yaitu

pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh kelompok tersebut terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan." Rappaport (1984) mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Menurut Friedman (1992) pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Definisi pemberdayaan masyarakat juga bisa ditinjau dari cara pandangnya. Cara pandang tersebut menjadikan adanya beberapa definisi pengabdian masyarakat sesuai alirannya. Definisi-definisi berikut merupakan definisi pemberdayaan masyarakat menurut aliran developmentalis, meliputi:

1. Adams (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan

masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup. Definisi tersebut berasal dari Kamus Pekerjaan Sosial, sebagai berikut:

the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services

2. Surjono & Nugroho (2008) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.
3. Wrihatnolo & Nugroho (2007) menyatakan bahwa community development (pembangunan masyarakat) dan community-based development pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community-driven development yang diterjemahkan sebagai

pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Pandangan yang kedua tentang definisi pemberdayaan masyarakat yaitu anti developmentalisme. Pandangan tersebut berkembang sekitar tahun 1980. Pandangan tersebut mempertanyakan gagasan dasar dari diskursus pembangunan. Ideologi pembangunan atau developmentalisme merupakan salah satu produk dari proyek pencerahan (*enlightenment*). Ideologi tersebut memiliki prinsip dasar penduniawian (sekularisasi); penalaran (rasionalisasi); dan individualisasi. Sehingga tiga landasan tersebut mendorong dilakukannya revolusi industri, revolusi ilmu pengetahuan, dan reformasi politik (Pranarka dan Vidhyandika M.: 1996, Hikam: 2000). Ideologi tersebut memiliki asumsi individu yang ditempatkan sebagai center of Being akan berakibat langsung dengan adanya eksploitasi alam tanpa batas. Sifat untuk mengeksploitasi tersebut yang perlu untuk menjadi bahan renungan bagi pembangunan masyarakat karena akan melahirkan budaya egosentris dan kekerasan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat dari pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah adanya suatu inisiatif program yang terencana yang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mandiri atau mampu untuk menolong dirinya sendiri untuk kehidupan yang lebih baik.

Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ditinjau dari proses operasionalisasi, terdapat kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder, kecenderungan tersebut seolah-olah memiliki sudut pandang yang berseberangan, namun sebenarnya kecenderungan primer diawali kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Kecenderungan primer merupakan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian kelompok tersebut melalui organisasi. Kecenderungan sekunder kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi,

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun ada beberapa kegagalan yang dihadapi. Kegagalan tersebut dikarenakan pendekatan konvensional seperti *transplantative planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer*, dan sejenisnya. Kegagalan tersebut sering terjadi pada Negara berkembang. Sri Widayanti (2012) menjelaskan beberapa dampak dari kurang tepatnya strategi yang di ambil pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan yang berarti, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan bagi masyarakat (the development of underdevelopment);
2. Melahirkan ketergantungan (dependency) dari negara sedang berkembang terhadap negara maju;
3. Melahirkan ketergantungan (dependency) dari periphery terhadap center;
4. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat terhadap negara/pemerintah; dan

5. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dll.) terhadap pemilik modal.

Berdasarkan informasi di atas, maka perlu adanya upaya metode yang sesuai dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Upaya-upaya dalam pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan dari berbagai cara. Menurut Sumodiningrat (2002) ada tiga cara untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* memiliki makna bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk menciptakan iklim yang menjadikan masyarakat bisa berkembang. Dalam menciptakan iklim tersebut maka perlu dilihat segala potensi yang telah ada, sehingga dapat diketahui potensi mana saja yang bisa dikembangkan. Potensi tersebut perlu digali dan perlu adanya penanaman kesadaran serta dorongan dan motivasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki daya yang bisa dioptimalkan.

Empowering bermakna bahwa dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya upaya nyata untuk

memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dalam kelompok tersebut. Upaya nyata tersebut bisa berbentuk langkah-langkah nyata yang positif, menyediakan berbagai masukan (input), membuka akses keberbagai peluang sehingga membuat masyarakat semakin berdaya. Hal ini berarti dalam upaya *empowering*, tidak hanya penguatan setiap individu dalam komunitas masyarakat tersebut, tetapi juga penguatan pranata-pranata dalam komunitas tersebut. Indikator utama dalam upaya *empowering* penguatan setiap individu adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk dirinya sendiri maupun keputusan bersama dalam masyarakat tersebut.

Protecting bermakna bahwa dalam pemberdayaan tersebut ada perlindungan, perlindungan terhadap pencegahan dari yang lemah menjadi bertambah lemah. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan terhadap yang lemah perlu menjadi keterpihakan yang utama. Dalam upaya *protecting*, perlu adanya perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah dan tidak adanya eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Upaya *protecting* bukan berarti ketergantungan dari yang

lemah secara terus menerus, tetapi bagaimana lebih keupaya bahwa masyarakat tersebut bisa mampu untuk membela, memajukan dan mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik secara berkesinambungan.

**b Masyarakat Terasing Pegunungan Meratus
Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai
Selatan**

Pegunungan Meratus secara geografis terletak di antara $115^{\circ}38'00''$ hingga $115^{\circ}52'00''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}28'00''$ hingga $2^{\circ}54'00''$ Lintang Selatan. Pegunungan tersebut mencakup delapan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tapin. Menurut tim penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pegunungan Meratus merupakan kawasan hutan yang bisa dikelompokkan sebagai hutan pegunungan rendah. Barisan gunung-gunung dari pegunungan Meratus membelah dua provinsi dari utara keselatan tenggara

Khusus Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara geologis terdiri dari pegunungan yang memanjang dari

arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawa, sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Sedangkan pegunungan meratus dan bagian utara sepanjang pegunungan meratus merupakan daerah berbukit berat dengan ketinggian 50-300 m dari permukaan air laut (Tjilik Riwut, 2007: 71)

Tabel berikut memberikan gambaran tentang wilayah dengan klasifikasi ketinggian di atas 1000 meter dengan persentase 0,9% yang hanya terdapat di Kecamatan Loksado.

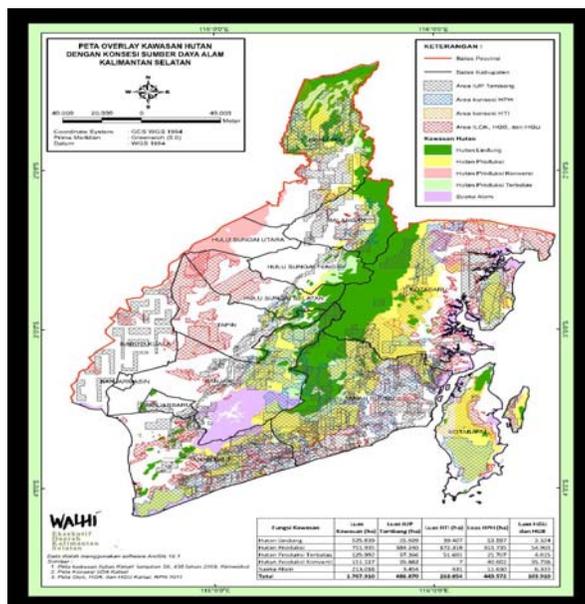
Tabel 1.1 Luas Wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kelas Ketinggian Dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan (Ha)

No.	Kecamatan	Luas wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (Ha)						Jumlah Total	
		0-7 M	7-25 M	25-100 M	100-250 M	250-500 M	500-1000 M		>1000 M
1	Padang Batung	0	2.527	12.407	5.459	0	0	0	20.393
2	Loksado	0	0	0	20.983	0	11.226	1680	33.889
3	Telaga Langsat	42	2.226	2.436	1.104	0	0	0	5.808
4	Angkinang	4.596	872	372	0	0	0	0	5.840
5	Kandangan	2.609	8.062	0	0	0	0	0	10.671
6	Sungai Raya	2.856	3.865	1.375	0	0	0	0	8.096
7	Simpur	7.533	702	792	0	0	0	0	9.027
8	Kalumpang	13.507	0	0	0	0	0	0	13.507
9	Daha Selatan	47.244	0	0	0	0	0	0	47.244
10	Daha Utara	26.811	0	0	0	0	0	0	26.811

11	Daha Barat		-	-	-	-	-	-	-
Kabupaten HSS		105.198	18.254	17.382	27.546	0	11.226	1.680	181.286
Presentase (%)		58,03	10,07	9,59	15,19	0,00	6,19	0,93	100

Sumber: Pokja Ampl Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Daerah berbukit dengan lereng terjal paling luas juga terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jatur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung (RKPD Kab Hulu Sungai Selatan). Hutan lindung memiliki fungsi utama yaitu sebagai daerah tangkapan air bagi wilayah di bawahnya.



Gambar 1.1 Peta Pegunungan Meratus

Sumber: <http://walhikasel.or.id/?p=318>

Gambar 1 di atas merupakan peta hutan lindung pegunungan meratus yang ditandai dengan warna hijau. Masyarakat pedalaman yang mendiami pegunungan meratus yang identik dengan wilayah yang berbukit sehingga masyarakat tersebut disebut dengan orang bukit. Orang bukit tersebut merupakan orang-orang yang dahulunya adalah orang-orang yang lari dari daerah pantai dikarenakan tidak mampu berinteraksi dan beradaptasi terhadap pengaruh eksternal yang tercermin pada mitos intingan dan Dayuhan.

Masyarakat pedalaman menghuni pegunungan meratus memiliki kehidupan sebagai peladang yang hidup berpindah (Tsing, 1998: 5). Di Kawasan pegunungan meratus berdiam ratusan suku bangsa Dayak yang dulu dikenal dengan sebutan orang bukit (gunung) yang berdiam dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut Balai (Yadah, 2002: 3).

Mengenai kondisi kehidupan masyarakat meratus, pemerintah dan masyarakat meratus tidak memiliki pandangan yang sama. Bagi pemerintah ladang yang berpindah-pindah, tempat tinggal yang berpindah,

penggunaan sumber daya alam yang tidak teratur merupakan perintang bagi keamanan sosial dan tanda bagi keterbelakangan dan keterasingan. Sedangkan bagi masyarakat meratus praktek tersebut merupakan bagian dari mata pencaharian untuk mempertahankan kehidupan (Tsing, 1998: 221). Hal tersebut menjadikan tidak selarasnya strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan prinsip kehidupan masyarakat terasing di meratus.

Tsing (1998: 222) juga menambahkan bahwa pemerintah membagi masyarakat terasing yang hidup berpindah secara tidak teratur dengan tiga golongan, yaitu: (1) pengembara, dengan ciri penduduk yang mata pencaharian dan tempat tinggalnya terus menerus berpindah, kondisi dan peralatan untuk hidupnya masih sangat sederhana, hidup dengan berburu, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan hampir tidak berkomunikasi dengan pihak luar, (2) semi pengembara, dengan ciri penduduk yang tempat tinggalnya menetap dalam waktu singkat, kondisi kehidupan, mata pencaharian, dan peralatan masih sangat sederhana, dan berkomunikasi dengan pihak luar namun terbatas, dan (3) menetap sementara, dengan ciri penduduk menetap dalam

waktu tertentu, kondisi kehidupan dan mata pencaharian masih sederhana, dan sering berkomunikasi dengan pihak luar.

Bagi Masyarakat pedalaman meratus hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Hutan adalah tempat masyarakat tersebut hidup dan mencari penghidupan. Masyarakat tersebut mengelola hutan secara bersama berbasis kebiasaan (adat) yang mereka yakini dengan pertimbangan ekonomis, ekologis dan keberlanjutan sebuah sistem pengelolaan.

Beberapa fenomena lain yang terjadi di alami oleh masyarakat pedalaman yaitu kehidupan masyarakat meratus mulai terusik ketika masyarakat tersebut tidak leluasa lagi untuk melakukan kebiasaan yang telah mereka lakukan secara turun temurun tersebut. Tanah yang biasa mereka gunakan untuk berladang di ambil oleh Negara yang mengambil alih untuk dieksploitasi secara massif. Keadaan tersebut semakin parah ketika pemerintah memberikan konsesi kepada pengusaha kayu dan memberikan HPH (Hak pengelolaan Hutan). Selain itu, dalam sektor pertambangan, pemerintah juga memberikan ijin untuk pengusaha pertambangan dalam melakukan eksploitasi perut bumi. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil

Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan tercatat ada 870 izin pertambangan minerba dengan luasan izin mencapai 2,1 juta hektar, sedangkan luas Kalimantan Selatan hanya 3,7 juta hektar, hal itu berarti lebih dari 50% wilayah Kalimantan Selatan telah dibebani izin pertambangan. Selain itu terdapat luas areal pertambangan 60.691 ha yang masuk ke dalam kawasan hutan, namun hanya terdapat 4 (empat) izin yang telah memiliki izin pinjam pakai kawasan dengan luasan 12.778 ha. Dalam proses Korsup Minerba yang dilakukan di Kalsel terdapat 7 (tujuh) izin IUP yang masuk ke dalam kawasan konservasi.

Maraknya perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi, ternyata tidak menyerap banyak masyarakat pedalaman sebagai pekerja, sehingga otomatis sumber kehidupan masyarakat pedalaman menjadi semakin minim. Dampak lainnya adalah rusaknya alam dimana masyarakat pedalaman tersebut tinggal, rusaknya tatanan masyarakat tradisional dan konflik internal bagi masyarakat pedalaman itu sendiri (Maunati, 2004: 192-194).

Berbagai hal di atas yang kemungkinan menjadikan masyarakat pedalaman meratus mengalami

penurunan yang pada tahun 1996 ke tahun 1997 mengalami penurunan yang cukup tinggi (Yadah, 2002: 3).

c. Ekoreligi

Ekoreligi merupakan cara pandang baru terhadap lingkungan yang dipandang dari tinjauan religi. Cara pandang tersebut muncul saat ini ketika peradaban kurang mengadaptasi harmoni alam. Hal ini dicirikan semakin rusaknya alam yang tidak hanya alam yang biasa dijamah, tetapi alam yang ada di daerah pedalaman juga telah mengalami kerusakan. Berdasarkan analisis rasional yang logis kerusakan lingkungan merupakan dampak dari sikap dan perilaku manusia yang memandang alam secara teknis ekonomis yang ditopang oleh teknologi. Dampak penggunaan teknologi tersebut yang sering kali merusak lingkungan. Binawan (2010: 195) menyatakan bahwa teknologi yang merupakan pilar ekonomi sehingga disebut cara berfikir manusia yang teko-ekonomis dan tampil dalam *homo techno-economicus*.

Kondisi lingkungan yang rusak tersebut, akhirnya akan memberikan dampak terhadap manusia itu sendiri. Dampak yang sering terjadi saat ini adalah pemanasan global, banjir, tanah longsor, tingginya kadar polusi, dan

lain sebagainya. Dari dampak yang sering terjadi tersebut, akhirnya menimbulkan kesadaran sebagian orang akan pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran tersebut menjadikan manusia kreatif untuk mencari berbagai cara untuk menjaga lingkungan.

Fios (2013: 1239) menyatakan bahwa ada dua hal penyebab krisis lingkungan yaitu pada tataran hidup praktis dan pada tataran wilayah teori atau cara berfikir. Pada tataran praktis kerusakan alam disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak berlandaskan pada nilai moralitas, sedangkan pada tataran teori atau cara berfikir lebih dinjau pada paradigma manusia terhadap alam. Paradigma tersebut yang akhirnya terwujud dengan tingkah laku yang tidak bijak terhadap alam dan cenderung tidak mempedulikan masa depan lingkungan. Skolimowski (1992) menyampaikan kritik tentang cara berpikir rasional (logika) dan ilmu pengetahuan modern yang cenderung mekanistik-reduksionistik yang akhirnya bertindak terhadap pengrusakan lingkungan alam.

Ekoreligi menjadi sebuah solusi untuk merawat dan melestarikan alam. Dimana adanya pembentukan dan penyadaran akan pola fikir yang baru yang melihat alam secara religi. Kesadaran-kesadara yang dibangun misalnya

adalah tentang alam semesta yang merupakan tanda kehadiran Tuhan dan adanya peran Tuhan dalam proses yang terjadi di alam. Menurut Skolimowski (1992) menunjukkan secara jelas pandangan ekologisnya tentang nilai-nilai luhur lingkungan alam sebagai substansi dasar yang kudus, suci, dan sakral. Sehingga dapat diprediksi bahwa ekoreligi akan menjadi suatu kesadaran manusia untuk mengembalikan keharmonisan alam. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Korten (2006: 47) yaitu orang yang memiliki kesadaran spiritual akan menginsafi bahwa lingkungan alam merupakan *integral world* dan memaknai keberadaan dirinya sebagai partner aktif atau co-creator dalam melayani evolusi ciptaan untuk mengaktualisasikan kemungkinan-kemungkinannya.

F. Metode Program

a. Metode dan Langkah-Langkah Kegiatan

Metode yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat ini adalah metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR pada dasarnya memiliki asumsi-asumsi, bahwa : (1) pendidikan adalah proses penyadaran dan pembebasan masyarakat dari ketertindasan; (2) pendidikan harus dimulai dari

pengalaman masyarakat sehari-hari; (3) pengalaman adalah sumber pembelajaran yang paling berharga; dan (4) bersifat andragogy. Tiga pilar PAR yakni : merupakan sebuah riset kritis, berlangsung dalam konteks pendidikan orang dewasa (*andragogy*), dan merupakan tindakan sosial politik. Kesemuanya merupakan rangkaian proses menuju perubahan.

Riset PAR dilaksanakan dalam satu siklus yang terdiri dari kegiatan :

1. Diagnosis
2. Rencana Aksi
3. Aksi
4. Evaluasi
5. Refleksi

Daur gerakan sosial dalam program ini, meliputi kegiatan :

1. Pemetaan awal (*preliminary mapping*);
2. Membangun hubungan kemanusiaan;
3. Penentuan agenda riset untuk perubahan sosial;
4. Pemetaan partisipatif (*participatory mapping*);
5. Merumuskan masalah kemanusiaan;
6. Menyusun strategi gerakan;
7. Pengorganisasian masyarakat;

8. Melancarkan aksi perubahan;
9. Membangun pusat-pusat belajar masyarakat;
10. Refleksi (teorisasi perubahan sosial); dan
11. Meluaskan skala gerakan dan dukungan.

Aplikasi daur gerakan sosial program secara menyeluruh membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pada tahap awal program ini daur gerakan sosial yang dilakukan sebatas pada tahap awal yaitu melakukan pemetaan awal. Pemetaan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang selama ini *stake holder* lakukan untuk masyarakat pedalaman pegunungan Meratus. Selain itu pemetaan tersebut juga untuk mengetahui potensi dan kondisi masyarakat pedalaman Meratus. Sehingga berdasarkan pemetaan tersebut maka akan dibuat strategi yang sesuai untuk menjawab dan menyelesaikan problem sosial dan ekologis yang menghimpit masyarakat meratus.

Teknik yang dilakukan pada pada tahap pemetaan ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menjaring data atau informasi yang berkaitan dengan potensi masyarakat terasing di pegunungan Meratus kecamatan Loksado dan kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan

suku terasing tersebut. Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat terasing di pegunungan Meratus khususnya masyarakat Desa Tumingki, sedangkan dokumentasi untuk mendokumentasikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

b. Tempat Kegiatan

Program ini akan dilaksanakan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dipusatkan pada dua buah balai adat, yaitu balai adat Haruyan dan balai adat Tanginau. Kedua balai adat tersebut berada di Desa Tumingki kecamatan Loksado yang merupakan masyarakat tradisional yang hidup secara bersahaja dengan menggantungkan hidup pada sistem ekonomi “*huma*” dalam wilayah hutan Meratus secara turun-temurun.

c. Tools

Tools yang digunakan dalam melakukan PAR meliputi :

1. *Rapid assesement*;
2. Analisa sosial kritis;
3. *Participatory assesement tools* untuk *need assesement*.

d. Pengorganisasian

Program Pemberdayaan Masyarakat Terasing Di Pegunungan Meratus Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dilaksanakan oleh tim LPASB Borneo Center bekerjasama dengan LP2M IAIN Antasari Banjarmasin, yang terdiri dari Tim Manajemen dan Konsultan serta Tim operasional (peneliti).

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Loksado

Kecamatan Loksado terletak \pm 40 KM dari Kota Kandangan (Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dan \pm 175 KM dari Kota Banjarmasin (Ibu Kota Kalimantan Selatan). Kecamatan Loksado memiliki luas Wilayah 338,89 km² atau 18,78% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan potensi alam yang begitu berlimpah dan beberapa tempat wisata seperti air terjun dan air panas alami.



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Loksado dengan Wisata Air Terjun
Sumber: Profil Kecamatan Loksado Tahun 2016

Jumlah penduduk Kecamatan Loksado yang terdata adalah sebanyak 8.959 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 26 jiwa/km². Adapun luas wilayah Kecamatan Loksado dan persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan Loksado

No	Desa	Luas Wilayah	Persentase
1	Halunuk	36.05	11
2	Panggungan	13.68	4
3	Lumpangi	24.62	7
4	Malinau	34.82	10
5	Hulu Banyu	40.44	12
6	Tumingki	28.91	9
7	Kamawakan	36.96	11
8	Loklahung	34.86	10
9	Loksado	9.51	3
10	Muara Ulang	41.18	12
11	Haratai	37.86	11
Jumlah		338.89	100

Sumber Data: KSK Kecamatan Loksado tahun 2015

Adapun batas desa di wilayah Kecamatan Loksado adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telaga Langsat dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Batung.

Sedangkan data penduduk Kecamatan Loksado menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Data Penduduk Kecamatan Loksado Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

No	Desa	Laki Laki	Perempuan	Rasio JenisKelamin
1	Halunuk	361	422	85,55
2	Panggungan	204	187	109,09

3	Lumpang	492	456	107,89
4	Malinau	552	550	100,04
5	Hulu Banyu	633	575	110,01
6	Tumingki	321	343	93,59
7	Kamawakan	243	252	96,43
8	Loklahung	292	232	125,86
9	Loksado	578	561	103,03
10	Muara Ulang	462	442	104,52
11	Haratai	442	513	86,16
Jumlah		4580	4533	101,04

Sumber : KSK Kec. Loksado tahun 2015

Di lihat dari kondisi alam, Kecamatan Loksado berupa hutan tropis berfungsi sebagai hutan lindung yang mendominasi kawasan pegunungan di Kalimantan. Hutan tropis tersebut terdiri dari tanaman atau tumbuhan dari keminting, damar, kayu meranti, pohon karet, kayumanis, ulin, lanan, dan lainnya.

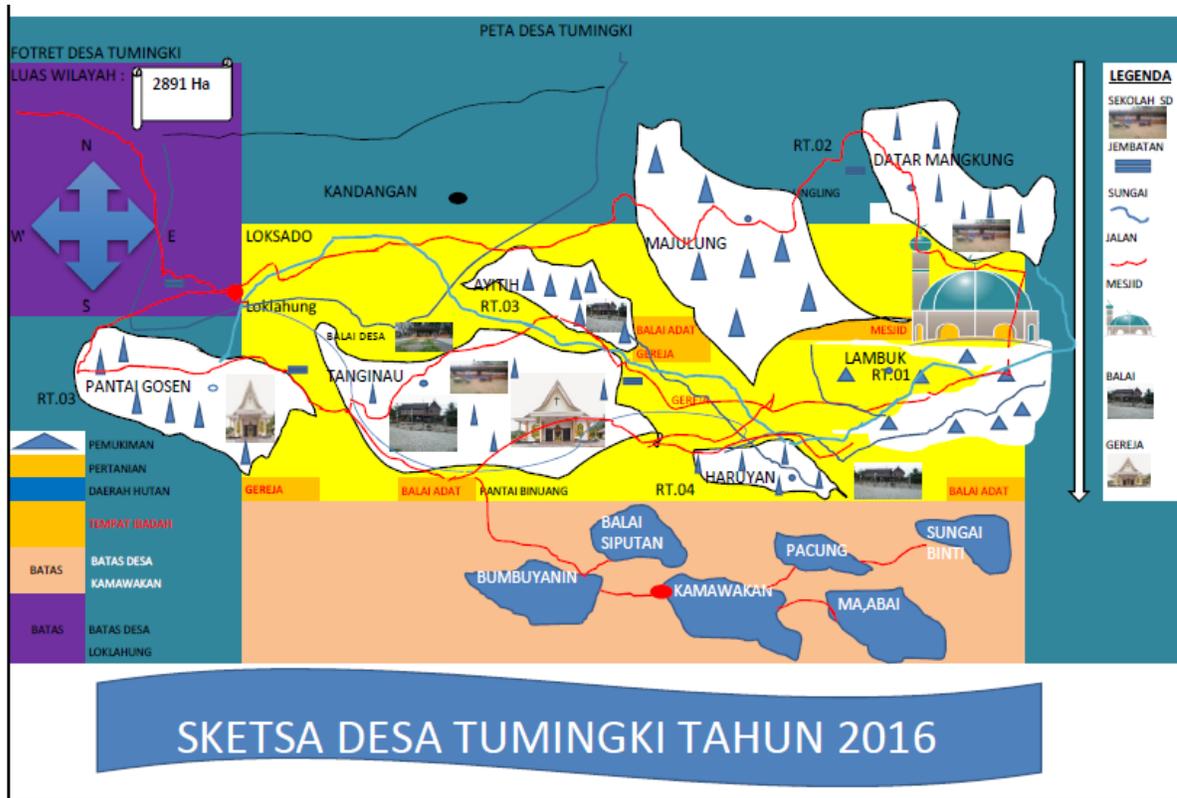
Pada umumnya wilayah kecamatan Loksado sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan dari 100 M sampai dengan lebih dari 1000 M dari permukaan laut. Masyarakat memiliki ladang yang luas di lereng-lereng untuk mengembangkan budaya *bahuma* (tanam padi) atau berladang. *Bahuma* bukan saja pekerjaan kaum lelaki, tetapi juga perempuan dan bahkan anak-anak mereka secara turun-temurun yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka.

Secara umum dapat dikatakan bahwa di Kalimantan (termasuk Kalimantan Selatan) masyarakat yang menghuni kawasan pedalaman dikenal dengan Suku Dayak secara umum, sementara daerah pantai atau daerah hilir yang mengitari kawasan Kalimantan di huni oleh Suku Banjar, Jawa, Bugis dan suku lainnya (Masri Singarimbun 1996: 258).

Masyarakat Loksado sendiri digolongkan ke dalam masyarakat Suku Dayak Meratus atau Orang Bukit adalah suku asli yang mendiami pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan (YADAH, 2002: 3). Menurut Hairus Salim dari kosa kata lokal di daerah tersebut istilah "*bukit*" berarti bagian bawah dari suatu pohon yang juga bermakna orang atau sekelompok orang atau rumpun keluarga yang pertama yang merupakan cikal bakal masyarakat lainnya

(https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Meratus). Adapula yang menamakan mereka sebagai Dayak Banjar, artinya Dayak yang berasal dari daerah Banjar yaitu Kalimantan Selatan.

B. Gambaran Umum Desa Tumingki Kecamatan Loksado



Gambar 2.2 Sketsa Desa Tumingki Tahun 2016
Sumber: Profil Desa Tumingki Tahun 2016

Desa Tumingki adalah salah satu desa di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari jumlah keseluruhan 11 desa. Desa Tumingki merupakan bentangan wilayah Pegunungan yang terletak pada wilayah Desa sekitaran hutan tropis. Tinggi wilayah adalah 750 – 1.200 mdpl dengan curah hujan mencapai 2000/3.000 Mm dan suhu rata-rata 25 °C- 30 °C.

Kehidupan masyarakatnya masih tradisional karena posisi mereka masih bisa dikatakan terisolasi (terasing) dari kehidupan masyarakat kota mengingat jarak antar desa cukup berjauhan. Jarak Desa Tumingki dengan Ibu Kota Kecamatan Loksado adalah 7 KM, lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan ± 30 menit, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 47 KM dengan lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten ± 1,5 jam.

Desa Tumingki memiliki luas wilayah 2.891 Ha dengan batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Loksado dan Hulu Banyu
- b. Sebelah Selatan : Desa Kamawakan dan Malinau
- c. Sebelah Timur : Desa Loklahung dan Kamawakan
- d. Sebelah Barat : Desa Hulu Banyu, Lumpangi

1. Kondisi Jalan Desa

Pada tahun 70-an, perjalanan menuju Loksado hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki dengan menghabiskan waktu kurang lebih 8 – 12 jam dari Ibu Kota Kabupaten. Perjalanan yang begitu menantang dengan menelusuri lereng bukit dan terkadang melintasi sungai yang berarus deras yang cukup berbahaya. Sungai di Loksado yang diberi nama Amandit merupakan *hulu* air yang mengalir ke Kota Kandangan, Ibu Kota Kabupaten dimana memang daerahnya lebih rendah. Sungai hanya dapat dijadikan sebagai sarana transportasi air dengan menggunakan rakit bambu atau sebutan bagi warga setempat “*lanting paring*” yang merupakan penghubung antara desa ke desa lainnya.

Sejak tahun 1970 pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah berupaya menyediakan fasilitas jalan beraspal sebagai jalur utama menuju Loksado. Proyek jalan utama ini dapat selesai pada tahun 1980 bertepatan dengan dibentuknya Kecamatan Loksado itu sendiri sebagai bagian dari daerah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Adapun dampak dari tersedianya fasilitas jalan utama beraspal tersebut dengan kekhasan jalannya yang berliku-liku dan turun-naik telah membuka isolasi dari marginalisasi masyarakat Suku Dayak Loksado menjadi masyarakat yang lebih maju dari keterasingan.

Meski demikian, masih ada beberapa desa yang bisa dikatakan terasing karena akses jalan penghubung yang masih sulit, salah satunya adalah Desa Tumingki (Ma’ruful Kahri, 2012), satu-satunya fasilitas jalan yang ada di Desa Tumingki adalah Jalan Desa dengan panjang jalan Rabat Beton/Cor 5 KM, lebar \pm 1 meter meski masih ada yang lebarnya $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Proyek fasilitas jalan tersebut berasal dari dana PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2010.

Kondisi material jalan telah diperbaiki meski ada beberapa titik yang belum diperbaiki karena terkelupas. Jalan menuju desa begitu berliku dan naik-turundikarenakan daerah pegunungan yang licin pada saat hujan dan hanya cukup dilewati oleh kendaraan bermotor roda

dua saja. Meskipun kondisi jalan seperti tersebut, dari data desa terdapat 237 unit kendaraan bermotor roda dua dan 2 unit mobil yang diletakkan di luar Desa Tumingki.

2. Kondisi Tanah Desa

Jenis tanah dan kesuburan tanah di Desa Tumingki Kecamatan Loksado menurut data Desa Tumingki 2016 adalah:

- a. Warna Tanah Rata-rata : Merah dan Hitam
- b. Tektur Tanah : Lempungan dan Porang
- c. Tingkat Kemiringan : 40 °
- d. Lahan Kritis : 50 Ha
- e. Lahan Terlantar : 06 Ha

Tabel 2.3 Data Klasifikasi dan Luas Wilayah Pertanian Desa Tumingki

No.	Klasifikasi Tanah	Luas Wilayah
1	Tanah Pemukiman	37,24 Ha
2	Tanah Sawah	-
3	Tanah Kering	445,10 Ha
4	Tanah Basah	35,52 Ha
5	Tanah Perkebunan	325,50 Ha
6	Tanah Fasilitas Umum	14,35 Ha
7	Tanah Hutan	480,20 Ha
8	Tanah Adat	54,62 Ha

Sumber: Profil Desa Tumingki 2016

3. Kondisi Sumber Air Desa

Sumber daya air pegunungan cukup berlimpah di luar musim kemarau, dengan mata air yang mengalir ke sungai-sungai kecil dan membawa air berkualitas bersih bahkan sejuk dan tawar. Untuk memenuhi keperluan air harian masyarakat memanfaatkan sumber mata air tersebut dan membuat sumur timba bila terjadi musim kemarau.

4. Kondisi Penerangan Desa

Saluran listrik belum masuk ke desa ini karena kondisi alamnya yang memang cukup sulit dijangkau dan jauh dari perkotaan sehingga saluran listrik di bawah Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) belum bisa direalisasikan sampai saat ini. Masyarakat hanya menggunakan lampu minyak dan obor dan untuk kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan mereka menggunakan mesin Genset.

Pada bulan Nopember 2016, Dinas memberikan 10 buah media tenaga surya untuk dimanfaatkan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sekarang masyarakat sudah mulai memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk keperluan mereka bersama.

5. Kondisi Sumber Daya Manusia di Desa Tumingki

Dari data yang ada, suku atau etnis yang tinggal di Desa Tumingki adalah 60 % Suku Dayak 40 % dari Suku Banjar. Jumlah penduduk di Desa Tumingki sebanyak 716 orang dengan rincian jumlah penduduk laki-laki adalah 308 orang dan jumlah penduduk perempuan adalah 328 orang dan yang 80 orang tidak terdata. Adapun jumlah Kepala Keluarga sebanyak 213 KK (Profil Desa 2016).

Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adalah Islam dengan jumlah pemeluk 297 orang, Kristen jumlah pemeluk 22 orang, dan Aliran Kepercayaan atau Kaharingan dengan jumlah pemeluk 345 orang (KSK Kecamatan Loksado 2015), dan ada 52 orang yang tidak masuk data keagamaan desa.

Dari 716 warga Desa Tumingki yang terdata ada 4 orang yang mengalami cacat fisik (Tuna Daksa), 3 orang Tuna Rungu, 2 orang Tuna Wicara, dan 1 orang Idiot. Pada ranah pendidikan dan mata pencaharian masyarakat di Desa Tumingki dari jumlah penduduk keseluruhan yang terdata sebanyak 716 penduduk dapat dilihat dari daftar di bawah ini:

Tabel 2.4 Data Pendidikan Penduduk Desa Tumingki

NO	STATUS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum Sekolah	203 Orang
2	TK	22 Orang
3	Belum Tamat SD/MI	300 Orang

4	Tamat SD/MI	120 Orang
5	Belum Tamat SLTP	27 Orang
6	Tamat SLTP	36 Orang
7	Belum Tamat SLTA	14 Orang
8	Tamat SLTA	20 Orang
9	Belum Tamat D1	-
10	Tamat D1	-
11	Belum Tamat D2	-
12	Tamat D2	-
13	Belum Tamat D3	-
14	Tamat D3	1 Orang
15	Belum Tamat S1	5 Orang
16	Tamat S1	7 Orang
17	S2	-
18	S3	-
19	SLB-A	-
20	SLB-B	-
21	SLB-C	-
22	Tidak Pernah Sekolah	12 Orang
Jumlah		716 Orang

Sumber: Profil Desa Tumingki 2016

Tabel 2.5 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tumingki

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	226 Orang
2	Buruh Tani	11 Orang
3	PNS	- Orang
4	Pedagang	6 Orang
5	Wiraswasta	4 Orang
	Pegawai Swasta	5 Orang

	TNI/POLRI	1 Orang
	Lainnya	59 Orang

Sumber: Profil Desa Tumingki 2016

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Potensi-Potensi Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, dan Lingkungan Alam yang Dimiliki

1. Sosial Budaya

Sebelum kata “Dayak” diterima secara umum, orang-orang menamakannya kelompok masyarakat yang tinggal di bukit-bukit pegunungan Meratus, berdasarkan nama tempat kediaman komunitas mereka tersebut yang umumnya tinggal di tepian sungai; seperti orang Barito, orang Kapuas, orang Kahayan, orang Katingan, orang Mentaya, orang Bukit (pegunungan) atau *bubuhan* orang Loksado, orang Alai, orang Labuhan, dan sebagainya. Mereka mendiami kawasan hutan di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Laut dan Kotabaru. Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2000 tidak secara khusus melakukan pendataan terhadap etnis tersebut, dan hanya menempatkannya dalam kelompok “suku-suku lain”. (BPS Kalimantan Selatan, 2000).

a. Budaya Kekeluargaan dan Keekerabatan

Masyarakat Dayak di Desa Tumingki sama halnya seperti masyarakat Dayak Meratus pada umumnya, mereka selalu mengembangkan suatu kelompok yang merupakan sistem kekerabatan. Kelompok keluarga ini terdiri dari beberapa keluarga inti (*umbun*) yang masih memiliki ikatan kekerabatan. Sebuah kelompok kekerabatan atau keluarga luas ini disebut *bubuhan* (Radam, 2001, hal. 120-121). Satu *bubuhan* biasanya tinggal di dalam suatu rumah panjang yang dinamakan balai atau balai adat, yakni bangunan atau rumah panggung yang berukuran 10 hingga 15 meter lebar dan 50 meter panjangnya dengan aula yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan tempat upacara adat.

Menurut dari berbagai sumber pustaka (Radam 2001, Jarani 2004, Rafiq 2005, Salim 2005, Muchamad 2007, Soehadha 2010, dan Wadjidi 2006; 2011), dapat dikatakan bahwa balai adat adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal (hunian) bagi sekelompok masyarakat Suku Dayak. Di Desa Tumingki terdapat tiga balai adat yaitu balai adat Aitih di dusun Aitih dengan Damangnya Bapak Tanda, balai adat Haruyan di dusun Haruyan Damangnya bernama Bapak Apau dan balai adat Tanginau di dusun Tanginau Damangnya Bapak Amban.



Gambar 3.1 Balai Adat Aitih Desa Tumingki Kec. Loksado



Gambar 3.2 Balai Adat Haruyan Desa Tumingki Kec. Loksado



Gambar 3.3 Balai Adat Tanginau Desa Tumingki Kec. Loksado



Gambar 3.4 Suasana Dalam Balai Adat Suku Dayak

Balai adat tidak hanya sebagai tempat tinggal semata, namun lebih memiliki makna sebagai perekat kekeluargaan dan kekerabatan antar sesama. Dalam kebiasaan masyarakat, balai adat dibangun secara berpindah-pindah mengikuti lokasi ladang-ladang milik tiap kelompok. Baik balai adat maupun ladang akan selalu berada dalam wilayah masing-masing kelompok. Tradisi bermukim dan fungsi balai adat ini telah berlangsung selama turun-temurun. Meskipun tidak pernah dituliskan dalam tradisi Suku Dayak, namun pengetahuan tentang balai adat ini

sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat Suku Dayak sendiri khususnya masyarakat di Desa Tumingki. Karakteristik yang dapat disimpulkan dari kebudayaan tersebut adalah:

1. Hunian berpindah-pindah mengikuti lokasi ladang pertanian,
2. Hunian bagi sekelompok masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan/kekerabatan, dan
3. Masyarakat pembangun dan penghuni yang menganut religi *huma* (berladang), yaitu kepercayaan akan kesucian tanaman padi serta kewajiban berladang tanaman padi.

Selain memiliki balai adat untuk hidup bersama, setiap kelompok telah memiliki wilayah permukiman tradisional yang disebut dengan *banua* dan biasanya terpisah cukup jauh dari kelompok masyarakat lainnya. Namun sekarang hunian atau balai adat yang berpindah-pindah tersebut mulai jarang ditemui karena masyarakat khususnya di Desa Tumingki sekarang sudah bisa dikatakan menetap dalam satu wilayah *banua* dengan mengalami pergeseran kebiasaan yang mana mereka sudah membangun dan mendirikan hunian atau rumah mereka sendiri di sekitaran balai adat, sehingga masing-masing *Umbun* tinggal dirumah mereka seperti keluarga di perkotaan pada umumnya yang biasanya masih ditinggali oleh beberapa kepala keluarga.

Sedangkan balai adat sendiri juga mengalami pergeseran fungsi dengan tidak lagi ditinggali dalam keseharian masyarakatnya, namun hanya difungsikan untuk pertemuan masyarakat, acara syukuran, perkawinan, maupun upacara adat (*aruh ganal*) ketika panen padi tiap tahunnya dan ini *aruh ganal* sebagai acara adat dan kebudayaan yang memiliki telah memiliki potensi wisata bagi masyarakat luar sekaligus dapat mengambil pelajaran tentang kekeluargaan yang begitu erat, bersahaja, dan menyukuri atas karunia dari sang Pencipta.

b. Budaya Pemanfaatan Hutan dan Pelestariannya

Beberapa kebudayaan yang masih terjaga di Desa Tumingki ini adalah meramu hasil hutan, berburu binatang, dan bercocok tanam dengan cara berladang berpindah (*shifting cultivation*) sebagai mata pencaharian mereka, namun tetap dalam koridor kearifan lokal yang mereka warisi secara turun temurun dengan menjaga dan mengambil ala kadarnya tidak untuk dikomersilkan secara berlebih. Biasanya mereka menebang kayu hanya apabila ingin membuat

rumah permanen saja, namun tidak semua kayu/pohon dapat mereka tebang untuk dijadikan rumah karena ada beberapa kayu/pohon yang mereka percaya dapat mengakibatkan bencana (*bala*) apabila digunakan sebagai bahan membuat rumah.

Selain itu mereka juga mempertimbangkan dalam menebang pohon yang telah berumur ratusan tahun, bila pohon tersebut ditebang maka berapa kali umur mereka untuk menumbuhkan kayu tersebut. Artinya dalam menebang pohon harus melihat keperluannya untuk apa, kalau tidak perlu sekali maka tidak akan menebang pohon karena menurut mereka hal tersebut merugikan. Hal tersebut merupakan sebuah kerifan lokal masyarakat adat yang dapat menjadi benteng penjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya. Masyarakat Dayak Meratus atau Orang Bukit membagi hutannya menjadi dua, yaitu:

1. Hutan budidaya atau produksi untuk keperluan mereka bertahan hidup, dan
2. Hutan lindung. Hutan lindungpun ternyata mereka bagi lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1).Hutan lindung yang masih bisa dimanfaatkan kayu-kayunya, tapi hanya untuk keperluan pribadi seperti pembangunan rumah atau keperluan adat, dan dilarang keras untuk diperjualbelikan.
 - 2).Hutan lindung yang kedua adalah zona larangan, hutan ini sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.

Hukum tersebut diberlakukan kepada semua masyarakat, dan jika melanggar akan dikenakan denda yang cukup besar sebagai hukum adat mereka yang harus ditaati dan dijunjungtinggi semua masyarakatnya yang telah diwariskan turun temurun oleh nenek moyang mereka lewat ajaran lisan.

Dalam becocoktanam padi yang disebut dengan *bahuma*, masyarakat selalu melalui tahapan-tahapan dari mulai kegiatan membuka hutan sampai dengan panen yang kemudian diakhiri dengan acara *aruh* sebagai wujud rasa syukur mereka kepada sang Pencipta. Dari kesemua tahapan tersebut hampir kesemuanya selalu didahului dengan ritual-ritual keagamaan, dan tidak sedikit juga dari tahapan tersebut yang ternyata mengandung nilai-nilai dasar konservasi. Adapun tahapannya adalah;

- 1) Batanung,
- 2) Manabas,
- 3) Batabang,

- 4) Manyalukut,
- 5) Manugal,
- 6) Marumput,
- 7) Basambu,
- 8) Mangatam,
- 9) Bawanang (Mahanyari),
- 10) Aruh Ganal.

Persepsi dan Interaksi terhadap Satwa Kearifan masyarakat adat Dayak Meratus terhadap mamalia terlihat dari adanya periode pemasangan jebak untuk mamalia besar seperti jenis kijang (*Muntiacus sp*), menjangan (*Cervus unicolor*) dan babi hutan (*Sus barbatus*) pada bulan Mei hingga Agustus. Periode tersebut merupakan penghujung musim hujan dimana air lebih terkonsentrasi ke arah sungai-sungai di daerah hilir yang lebih dekat dengan pemukiman sehingga pergerakan satwa juga terkonsentrasi menuju sumber air tersebut, hal inilah yang menjadi dasar adanya periode pasang jebak di masyarakat adat Dayak Meratus.

Selain periode tersebut tidak dilakukan pemasangan jebak, hal tersebut merupakan kearifan masyarakat adat setempat untuk tetap menjaga keseimbangan ekologis pegunungan dimana jika pemasangan jebak dilakukan sepanjang tahun di khawatirkan akan mengancam keberadaan satwa tersebut di Pegunungan Meratus. Kearifan lain dalam hal pengelolaan satwa liar terutama mamalia adalah sebelum memburu, mereka harus meminta izin dulu dengan roh nenek moyang yang diyakini mendiami kawasan Pegunungan Meratus. Dalam hal berburu, tidak dibenarkan untuk dikomersialkan atau hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga saja dan tidak berlebih-lebihan.

c. Budaya Kepemimpinan dan Pemerintahan

Dalam kehidupan masyarakat Dayak juga terdapat suatu pemerintahan berupa lembaga / institusi adat, yang mana berfungsi untuk mengatur hubungan – hubungan sosial kemasyarakatan baik intern maupun dengan wilayah dan juga untuk menjaga hukum adat yang telah disepakati bersama dari dulu. Institusi adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun struktur pemerintahannya pada waktu itu secara hirarkis adalah Pamangku, Patinggi, Damang, Pangiwa dan Panganan, Penghulu Adat, dan Masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan kelembagaan adat tersebut sedikit demi sedikit mulai dihilangkan. Sampai akhirnya dalam struktur kelembagaan adat tersebut yang tersisa hanyalah Damang, Wakil Damang, Penghulu Balai, Kepala Padang dan Masyarakat.

Kearifan tradisonal Masyarakat Adat Dayak Loksado dimana hutan dan segala isinya termasuk satwa dipandang secara menyeluruh dan sebagian diatur dalam aturan adat. Lebih mendalam lagi dari paparan di atas terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang bisa dicermati dalam budaya Dayak Meratus di Desa Tumingki, yaitu:

1. Kekeluargaan, semua hal dilakukan secara kebersamaan sehingga rasa kekeluargaan dalam masyarakat terjaga dalam keseharian seperti keseharian yang penuh dengan interaksi sosial.
2. Keberlanjutan, dari sisi keberlanjutan ini masyarakat tidak hanya memikirkan untuk hari ini tapi memikirkan untuk keperluan anak cucu mereka di masa mendatang seperti tidak membabat habis kekayaan hutan.
3. Kebermanfaatan bersama, pada ranah kebermanfaatan masyarakat memprioritaskan hal yang bermanfaat bagi sesama, seperti bila ada keluarga atau tetangga yang melakukan hajatan maka masyarakat bergotongroyong secara penuh baik tenaga, pikiran, bahan makanan dan lainnya.
4. Keanekaragaman hayati, dan dari paparan di atas tadi jelas sekali kebiasaan orang-orang Dayak di desa ini begitu menjaga keanekaragaman hayati yang telah dititipkan sang Pencipta kepada mereka berupa kekayaan alam.
5. Kepatuhan kepada hukum adat, Hukum adat memang menjadi salah satu kekhasan mereka karena dengan patuh terhadap hukum adat tersebut maka mereka merasa terhormat dan dihormati dan begitu juga sebaliknya.

2. Sosial Ekonomi

Sebagai komunitas yang mendiami kawasan pegunungan Meratus yang lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh kawasan hutan maka paradigma Orang Bukit atau Orang Dayak

Meratus atas tata kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan hutan alam disekitarnya. Hegar dalam Majid (2002:3-4), mengemukakan bahwa hutan bagi Suku Dayak Meratus merupakan bagian dari nafas hidupnya. Pola Pemanfaatan Ruang ditujukan masyarakat bersifat holistik pula bukan hanya menekankan pada aspek ekonomi dengan pendekatan biofisik saja, tetapi meliputi seluruh kebutuhan baik aspek politik, sosial, budaya, hal-hal yang dapat dihitung (*tangible*), dan hal yang tak dapat dihitung (*intangible*).

Mata pencaharian utama masyarakat adalah bercocok tanam padi (*bahuma*), bahkan bisa dikatakan *bahuma* sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat mereka tinggalkan karena selain hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan akan pangan mereka selama setahun, *bahuma* juga dapat mereka gunakan sebagai media atau cara mereka “berkomunikasi” dengan Sang Pencipta. Masyarakat Dayak Meratus menyebut sistem perladangan mereka dengan perladangan gilir balik. Tahapan dalam kegiatan berladang dikenal dengan 6 M yaitu Menebas, Menebang, Membakar, Menanam, Merumput dan Memanen. Setiap tahapan kegiatan tersebut tidak lepas dari ritual adat Kaharingan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pemanfaatan lahan dengan cara *bahuma* yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya mengikuti siklus alamiah dimana kawasan hutan yang dibuka adalah merupakan bekas pahuaman yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun yang lalu dan selama itu mereka jarang bahkan tidak pernah membuka lahan di hutan-hutan primer yang biasanya berada pada ketinggian diatas 700 dpl.

Masyarakat Dayak memiliki hukum adat atau aturan-aturan adat yang terkait dengan perladangan yang pamali (mendatangkan akibat buruk) apabila dilanggar. akibat pengaruh jarak dan masuknya agama serta budaya luar menyebabkan perlahan-lahan ritual adat Kaharingan mereka semakin ditinggalkan karena ada yang bertentangan dengan keyakinan yang telah dianut sebagian yang lain. Perladangan yang dilakukan masyarakat menunjukkan adanya perubahan dalam hal sistem pengolahan lahan, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan lahan semakin sempit dan memperpendek masa. Masyarakat sudah mulai melakukan pemakaian pupuk dan pestisida dalam berladang. Masyarakat melakukan sistem agroforestri sederhana guna menambah hasil ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Secara umum masyarakat peladang di desa dengan pola hidup tradisional dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan perladangan perlu adanya sistem pengelolaan hutan yang bersifat menyeluruh.

Sistem ini berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperhatikan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat dan tidak melupakan budaya masyarakat Dayak yang mendiami kawasan hutan lindung pegunungan Meratus. (Asyisyifa, Aspek sosial ekonomi sistem perladangan suku dayak maratus kec. loksado 2007).

Di luar sektor perladangan, masyarakat memilih untuk menambah pendapatan dari perdagangan dan jasa (sopir, buruh, tukang) atau meninggalkan desa mereka untuk mencari pekerjaan. Selain itu, mereka juga menanam tanaman perkebunan dibekas perladangan mereka, tanaman perkebunan tersebut antara lain seperti karet (*gatah*), kayu manis dan keminting/kemiri yang keseluruhan hasilnya dapat mereka jadikan sebagai sumber pendapatan utama dalam bentuk uang tunai.

Sumber pendapatan masyarakat lainnya adalah memanfaatkan hasil hutan non kayu (*non timber forest product*) seperti walatung/manau, rotan/paikat, damar, madu dan lain-lain. Untuk memanfaatkan waktu luang sebagian masyarakat yang terdiri dari kaum wanita atau ibu-ibu serta kaum pria yang sudah lanjut usia mengisinya dengan membuat berbagai macam anyaman atau kerajinan dari bambu, bentuk kerajinan ini berupa tikar, lanjung, bakul, butah, tengkiring dan lain-lain. Hasilnya sebagian untuk keperluan sendiri dan sebagian lagi akan dijual apabila ada turis atau pengunjung dari luar yang datang ketempat mereka dan ingin membeli kerajinan tersebut.

3. Lingkungan Alam

Pegunungan Meratus merupakan lingkungan alam dengan kawasan hutan alami yang masih tersedia di Propinsi Kalimantan Selatan, letaknya membentang dari arah Tenggara sampai Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan luasnya diperkirakan lebih dari sejuta hektar. Seperti umumnya kawasan pegunungan, kawasan ini termasuk ekosistem yang ringkih (*fragile ecosystem*) dan juga merupakan *ecological sensitive area*, dimana menuntut ekstra hati-hati dalam pembangunan kawasan pegunungan tersebut.

Salah satu penyedia keanekaragaman hayati Indonesia adalah Kalimantan dan Pegunungan Meratus merupakan salah satu *hot spot* penyumbang tingginya angka biodiversitas tersebut. Lansekap Pegunungan Meratus berupa daerah berbukit-bukit yang sangat beragam dari sedang-terjal-sangat terjal dan beragam pula formasi ekosistem yang membentuknya. Sebagian kawasannya masih ditutupi oleh hutan alami, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi

yang didominasi oleh formasi hutan campuran *dipterocarpaceae* perbukitan bawah-atas dan hutan hujan pegunungan. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sebagian besar kelompok Hutan Lindung Pegunungan Meratus dapat dikelompokkan sebagai hutan pegunungan bawah (*Lower montane tropical rain forests*) (Whitemore 1984 dalam Whitten, 1997). Berdasarkan hasil survei mikro pada tahun 1984 (Badan Intag, 1984), jenis pohon-pohon yang dominan adalah : Meranti putih (*Shorea spp*), Meranti merah (*Shorea spp*), Agathis (*Agathis spp*), Kanari (*Canarium dandiculatum BI*), Kempas (*Koompassia sp*), Belatung (*Quercus sp*), Durian (*Durio sp*), Gerunggang (*Croloxylon arborescen BI*), Nyatoh (*Palaquium spp*), dan Medang (*Litsea sp*).

Adapun aspek fauna, berdasarkan catatan dari Ekspedisi Meratus 2005 yang dilakukan bersama masyarakat adat, minimal adalah mamalia sebanyak 78 jenis dari 21 suku, Avifauna sebanyak 316 jenis dari 47 suku atau sekitar 88.27% dari jumlah jenis burung di pulau Kalimantan, yaitu 358 jenis (lihat MacKinnon, dkk, 1998), Herpetofauna 130 jenis dan 20 suku, ikan 65 jenis dari 25 suku), dan insekta 408 jenis dari 54 suku. Berbicara tentang Pegunungan Meratus, tentunya tidak akan melewatkan sebuah kawasan yang sudah cukup dikenal baik lokal maupun regional yaitu Loksado.

Loksado sebagai salah satu area yang masuk dalam kawasan Pegunungan Meratus merupakan area yang kaya dengan sumber daya alam, 12 jenis tumbuhan endemik ada di daerah ini, dua diantaranya adalah keluarga palmae dan satu jenis lagi yang sangat diminati oleh pihak *Botanical Garden Edinburgh* Inggris adalah *Rhododendron alborugosum*. Sembilan jenis endemik lainnya adalah Lahung (*Durio dulcis*), Damar merah (*Shorea beccariana*, *S. parvistipulata*), Pitun (*Shorea myrionerva*), Damar (*Shorea obscura*, *S. rugosa*), Tengkwang (*Shorea stenoptera*), Resak (*Vatica enderti*) dan Binturung (*Artocarpus lanceifolius*). Kesembilan jenis ini hanya ada di pulau Kalimantan.

Sedangkan untuk khazanah satwa, pada kawasan ini tidak kurang dari 31 jenis mamalia, 95 jenis avifauna, 46 jenis kupu-kupu, 24 jenis herpetofauna, dan 37 jenis ikan . Selain itu, diyakini kawasan ini merupakan surganya anggrek. Tidak menutup kemungkinan apa yang Lamb (1991) perkirakan bahwa 2500 sampai 3000 jenis anggrek yang ditemukan di Borneo atau setara dengan 10% anggrek di dunia ini, Loksado juga salah satu penyumbang tingginya angka kekayaan jenis ini.

Saat ini masyarakat Dayak Meratus sedang melakukan pemetaan hutan lindungnya. Saat ini telah terdata seluas 8 ribu hektar. Selain kayu-kayuan, hutan mereka juga menyediakan

berbagai macam tanaman obat-obatan yang telah diwariskan pengetahuannya secara turun temurun dari zaman keturunan Dayak Meratus. Hasil bumi dan ladang seperti kayu manis, tanaman karet, padi, sangat mencukupi kebutuhan mereka, sehingga tidak pernah ada cerita kelaparan atau gagal panen melanda Loksado dan desa-desa sekitarnya termasuk Desa Tumingki.

Secara umum, di wilayah Loksado sendiri terdapat beberapa hasil tambang yang masih terkubur, namun masyarakat Dayak tidak mau menggarap atau memberikan izin kepada pemerintah maupun investor, hal ini disepakati masyarakat karena melihat kerusakan yang terjadi bagi daerah tambang. Ada cerita tentang masuknya investor ingin membuka tambang di daerah tersebut Loksado, namun melihat dampak kerusakan yang diakibatkan pertambangan seperti di daerah tetangga yaitu Tanah Bumbu, rencana pembukaan tambang seketika ditolak masyarakat Dayak Meratus dan akhirnya pembukaan tambang tidak pernah terealisasi sampai sekarang.

Di Desa Tumingki sendiri setidaknya terdapat bijih besi disepanjang sungainya, namun demi menjaga kelestarian bumi loksado, masyarakat enggan untuk memanfaatkan potensi alam tersebut yang ada di lingkungan hidup mereka. Selain hasil hutan dan tambangnya, Tumingki ternyata juga memiliki potensi wisata Air Terjun dan Puncak Gunung Tanginau.



Gambar 3.5 Potensi Tambang Bijih Besi

B. Sektor-Sektor Perekonomian yang Dapat Dikembangkan Dalam Aspek Ekoreligi untuk Kesejahteraan Hidup Orang Meratus.

Dari hasil penelitian yang didapat dengan observasi dan wawancara, maka diperoleh analisis mengenai pantawan *stake holders* desa secara umum terhadap tingkat potensi desa di bawah ini:

- Potensi Umum : SEDANG
- Potensi Sumber Daya Alam : TINGGI
- Potensi Sumber Daya Manusia : LEMAH
- Potensi Kelembagaan : SEDANG
- Potensi Prasarana dan Sarana : RENDAH

Dari keterangan di atas terlihat bahwa potensi sumber daya manusia (SDM) dinyatakan lemah sehingga perlu perhatian khusus untuk taraf pendidikan yang lebih baik demi generasi masyarakat terasing di desa Tumingki tersebut, ini menjadi tugas bersama khususnya pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten sebagai bagian dari wilayah administrasi.

Begitu juga dengan potensi prasarana dan sarana yang kurang diperhatikan oleh pemerintah secara merata, kendala yang di dapat memang tidak mudah dengan situasi dan kondisi di daerah hutan pegunungan seperti desa Tumingki, namun dengan kerjasama semua pihak maka peningkatan SDM sebagai penjaga dan pemberdaya Sumber Daya Alam (SDA) dapat maksimal tanpa harus mengorbankan alam.

Adapun deskripsi keuntungan dan kendala dari sektor-sektor perekonomian yang dapat dikembangkan dalam aspek ekoreligi untuk kesejahteraan hidup orang Meratus di desa Tumingki dapat dilihat di bawah ini:

1) Potensi Tanaman Pangan : CUKUP POTENSIAL

- *Keuntungan* :

Tanah di pegunungan merupakan tanah yang subur dan masih luas sehingga bila dilakukan dengan benar akan menjadi penghasilan yang memadai bagi masyarakat.

- *Kendala* :

Tidak adanya modal yang memadai untuk biaya produksi baik pupuk maupun bibit serta jasa angkutan yang mahal untuk mengantar ke pasar.

2) **Potensi Tanaman Apotek Hidup** : KURANG POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Tekstur tanah Lempungan dan Porang yang masih subur sehingga bila dilakukan dengan benar akan menjadi tambahan penghasilan sekaligus untuk persiapan obat masyarakat tanpa mereka mencari kehutan bila dibudidayakan di permukiman.

- **Kendala** :

Tidak adanya bibit yang berkualitas baik, Air di permukiman kurang memadai untuk pengairan di musim kemarau, kurangnya pengetahuan tentang tanaman apotek hidup yang bisa dibudidayakan, masyarakat lebih faham tentang obat alami yang tumbuh di hutan.

3) **Potensi Perkebunan** : CUKUP POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Tanah di pegunungan merupakan tanah yang subur sehingga bila dilakukan dengan benar akan menjadi tambahan penghasilan sekaligus untuk persiapan obat masyarakat tanpa mereka mencari kehutan bila dibudidayakan di permukiman. Perkebunan memang sudah masyarakat desa lakukan seperti menanam karet (*gatah*), kayu manis dan keminting/kemiri di bekas ladang setelah mereka selesai *bahuma*.

- **Kendala** :

Kurangnya modal untuk perkebunan skala besar sampai skala sedang, jasa angkut sangat sulit karena kendaraan roda 4 tidak bisa masuk perdesaan sehingga membuat biaya angkut mahal, sehingga bahan perkebunan seperti karet (*gatah*), kayu manis dan keminting/kemiri cukup murah dijual ke pasar-pasar di luar desa seperti di Kecamatan apalagi ke Kabupaten, tidak adanya varian bibit baru yang berkualitas baik.

4) **Potensi Kehutanan** : KURANG POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Tanah di pegunungan merupakan tanah yang subur sehingga bila dilakukan dengan benar akan menjadi usaha yang memadai untuk mengangkat taraf hidup masyarakat.

- **Kendala** :

Kurangnya modal untuk pemberdayaan dan pemanfaatan kehutanan dalam skala besar sampai skala sedang tanpa merusak ekosistem yang ada, jasa angkut sangat sulit karena kendaraan roda 4 tidak bisa masuk perdesaan sehingga membuat biaya angkut mahal, tidak ada perairan yang bagus.

5) **Potensi Peternakan** : CUKUP POTENSIAL

Tabel 3.1 Data Peternakan di Desa Tumingki

JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK	JUMLAH PETERNAK
a. Sapi	0 ekor	-
b. Kerbau	0 ekor	-
c. Ayam Kampung	200 ekor	-
d. Ayam Broiler	0 ekor	-
e. Bebek	6 ekor	1 orang
f. Kambing	0 ekor	-
g. Domba	0 ekor	-
h. Angsa	0 ekor	-
i. Kelinci	0 ekor	-
j. Anjing	30 ekor	10 orang
k. Kucing	27 ekor	24 orang
l. Burung	10 ekor	5 orang
m. Babi	40	20 Orang

Sumber: Profil Desa Tumingki 2016

- **Keuntungan** :

Tanah di desa masih sangat begitu luas dan masih banyak yang belum dipergunakan untuk kegiatan peternakan, lingkungan hutan masih dapat digunakan untuk pangan ternak, jenis ternak belum semuanya dibudidayakan masyarakat.

- **Kendala** :

Kurangnya modal untuk bibit skala besar, jasa angkut ternak masih sangat sulit karena kendaraan roda 4 tidak bisa masuk perdesaan sehingga membuat biaya

angkut mahal, sulitnya air di musim kemarau, masyarakat lebih memilih untuk *bahuma* sebagai ekoreligi yang mereka anut, kurangnya pemahaman kebermanfaatannya pengembangbiakan ternak seperti aspek ekonomi, pendapatan desa, dan suplai ternak di pasar-pasar tradisional maupun *super market*.

6) **Potensi Perikanan** : KURANG POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Lahan di desa sangat memberikan potensi untuk penggarapan perikanan dengan kolam-kolam buatan atau penambatan pada pinggiran sungai, lingkungan hutan memberikan pakan ikan buatan yang alami. Masyarakat sebenarnya telah membudidayakan potensi perikanan ini dengan besar kolam 2,5 Ha sebanyak 16 Unit dengan bibit Ikan Campuran Lokal.

- **Kendala** :

Kurangnya modal untuk bibit skala besar, jasa angkut ikan ke pembeli masih sangat sulit karena kendaraan roda 4 tidak bisa masuk perdesaan sehingga membuat biaya angkut mahal, sulitnya air di musim kemarau, masyarakat lebih memilih untuk *bahuma* sebagai ekoreligi yang mereka anut, kurangnya pemahaman tentang kebermanfaatannya pembudidayaan ikan khususnya ikan sungai air tawar yang segar dan sehat yang selalu dilirik masyarakat, industri rumah tangga, bahkan pasar swalayan.

7) **Potensi Pertambangan** : KURANG POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Tanah di desa masih sangat begitu luas dan masih banyak yang belum digarap untuk mengetahui potensi tambang yang ramah lingkungan, seperti bijih besi yang ada di pinggiran sungai untuk di ulah sebagai bahan produk rumah tangga.

- **Kendala** :

Sedikitnya bahan pertambangan, murahnya harga jual hasil pertambangan, tidak adanya alat dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menggarap dan memproduksi bahan tambang yang ramah lingkungan.

8) **Potensi Jasa dan Perdagangan** : CUKUP POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Di desa banyak hal yang belum digarap secara masif seperti perkebunan, perikanan, peternakan dengan skala besar sehingga kalau hal-hal tersebut digarap dan membuahkan hasil, maka potensi jasa akan sangat diperlukan dan perdagangan menjadi meningkat sampai keluar desa Tumingki itu sendiri.

- **Kendala** :

Sulitnya mencari jasa dan mahalnya harga jasa karena faktor jarak tempuh dan kondisi jalan/lokasi yang tidak bisa dimasuki kenaraan roda empat sehingga walaupun ada bentuk perdagangan pembeli dari luar desa tidak mau langsung datang membeli ke desa Tumingki. Untuk jasa, masyarakat kurang tertarik karena memang tidak banyak yang memerlukan jasa angkutan.

9) **Potensi Industri** : KURANG POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Dengan lahan pegunungan yang begitu luas, masyarakat dapat meningkatkan usaha mereka dalam produksi rumah tangga sedang sampai besar dengan kekhasan hasil hutan yang dapat dibudidayakan seperti yang sudah berjalan selama ini dalam pembuatan kerajinan berupa tikar, lanjung, bakul, butah, tengkiring dan lain-lain bahan bambu, hal ini bisa ditingkatkan baik dari kreatifitas yang berkualitas maupaun kuantitas.

- **Kendala** :

Kurangnya kreatifitas industri karena pemahaman masyarakat kurang menonjolkan bidang ini, sulitnya membuka lapangan pekerjaan dalam industri rumah tangga karena tidak adanya modal usaha.

10) **Potensi Wisata** : KURANG POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Di daerah hutan pegunungan potensi wisata cukup bisa dikelola untuk menimbulkan daya tarik maupun daya eksotis wisata bagi wisatawan dalam negeri apalagi luar negeri yang selalu penasaran dengan sesuatu yang berbau alamiah, mistis dan hal-hal yang unik bagi mereka. Banyak hutan-hutan yang pantas untuk dijadikan tempat wisata karena kekhasannya misalnya, kehidupan masyarakat yang bercirikan ekoreligi, adanya air terjun dan puncak gunung Tanginau dengan pemandangan hutan di ketinggian yang dapat memanjakan mata. Adanya tiga

Balai Adat di Desa Tumingki yaitu 1). Balai Adat Aitih (lihat Gambar 3.1), 2). Balai Adat Haruyan (lihat Gambar 3.2), dan 3). Balai Adat Tanginau (lihat Gambar 3.3).

- **Kendala** :

Tidak di bangunnya tempat/fasilitas wisata, karena pemerintah masih menganggap belum adanya daya tarik atau daya eksotis wisata di desa Tumingki. Tiga Balai Adat tidak difasilitasi dengan baik seperti hiasan-hiasan khas Dayak MERatus atau Dayak Bukit.

11) **Potensi Persawahan** : KURANG POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Bersawah atau berladang yang mereka sebut dengan *bahuma* adalah kegiatan dan mata pencaharian utama bagi masyarakat yang telah turun temurun dan memiliki kekhasan tersendiri dengan ritual-ritualnya yang bisa menarik wisatawan setiap tahunnya dengan ciri ekoreligi ini, potensi persawahan dapat ditingkatkan bila dikelola dan diarahkan dengan seksama agar menjadi pendapatan masyarakat berskala besar karena beras dari gunung merupakan salah satu pilihan masyarakat kota pada umumnya.

- **Kendala** :

Tidak ada saluran air dan sulitnya air ketika musim kemarau, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan sistem persawahan gilir balik. Masyarakat dalam bersawah atau berladang, hasilnya tidak mereka jual namun untuk keperluan mereka selama setahun, hal ini juga sebabkan karena produksi padi yang terbatas dan sulitnya menjual ke luar desa karena akses jalan.

12) **Potensi Komoditi Buah-buahan** : CUKUP POTENSIAL

- **Keuntungan** :

Tanah di pegunungan merupakan tanah yang subur sehingga bila dilakukan dengan benar akan menjadi tambahan penghasilan bila dibudidayakan di permukiman.

- **Kendala** :

Kurangnya modal untuk potensi ini dengan skala besar sampai skala sedang, jasa angkut sangat sulit karena kendaraan roda 4 tidak bisa masuk perdesaan sehingga

membuat biaya angkut mahal dan harga buah-buahan jadi murah bila di jual ke pasar-pasar di luar desa seperti di Kecamatan apalagi ke Kabupaten, tidak adanya varian bibit baru yang berkualitas baik dan unggul.

C. Pemetaan Terhadap Usaha yang Telah Dilakukan *Stake Holders* dalam Membangun Masyarakat Terasing dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Kehidupan Orang Meratus.

1. Lembaga-Lembaga Penunjang di Desa Tumingki

A. Lembaga Pemerintahan

1). Pemerintah Desa

- 1 (satu) Orang Kepala Desa
- 1 (satu) Orang Sekretaris Desa
- 1 (satu) Orang Kaur Pemerintahan
- 1 (satu) Orang Kaur Pembangunan
- 1 (satu) Orang Bendahara Desa
- 4 (empat) Rukun Tetangga (RT) dan 2 (dua) Rukun Keluarga

2). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 1 (satu) Orang Ketua
- 1 (satu) Orang Wakil Ketua
- 1 (satu) Orang Sekretaris
- 2 (Dua) Orang Anggota

B. Lembaga Kemasyarakatan

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | : 1 Lembaga |
| 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | : 1 Lembaga |
| 3. Rukun Warga (RW) | : 2 RW |
| 4. Rukun Tetangga (RT) | : 4 RT |
| 5. Karang Taruna (KT) | : 1 Lembaga |
| 6. GAPOKTAN | : 1 Gapoktan |
| 7. Kelompok Tani | : 3 Kelompok |
| 8. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) | : Tidak Ada |
| 9. Dewan Kesejahteraan Mesjid (DKM) | : Tidak Ada |
| 10. Organisasi Masyarakat Gereja | : Tidak Ada |
| 11. Kelompok Gotong Royong | : 2 Kelompok |
| 12. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) | : Tidak Ada |

C. Lembaga Politik : Tidak Ada

D. Lembaga Ekonomi

- 1). Lembaga Ekonomi & Unit Usaha Desa : 1
- 2). Jasa Lembaga Keuangan : Tidak Ada
- 3). Industri Kecil dan Menengah : 1
- 4). Usaha Jasa Pengangkutan : 10
- 5). Usaha Jasa Perdagangan : 4
- 6). Usaha Jasa Hiburan : Tidak Ada
- 7). Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM & Air : 1
- 8). Usaha Jasa Keterampilan : 3
- 9). Usaha Jasa Hukum dan Konsultan : Tidak Ada
- 10). Usaha Jasa Penginapan : -

E. Lembaga Pendidikan

- 1). Pendidikan Formal
 - KB / TK : 2 Unit pembangunannya dari Alokasi Dana Desa (ADD), begitu juga untuk honor 3 gurunya menggunakan dari dana desa tersebut.



Gambar 3.6 Bangunan Kelompok Bermain “Tumingki Ceria”

- SDN : 2 Unit dari Dana Dinas Pendidikan. SDN Tumingki 1 sudah ada perbaikan infrastruktur, sedangkan SDN Tumingki 2 belum ada renovasi dengan bangunan yang kurang terawat.



Gambar 3.7 Bangunan SDN Tumingki 1



Gambar 3.8 Bangunan SDN Tumingki 2

- MIN : Tidak Ada

- MD : Tidak Ada
- SMPN : Tidak Ada
- SMAN : Tidak Ada

2). Pendidikan Non Formal

- RA : Tidak Ada
- IBTIDAIYAH : Tidak Ada
- TSANAWIYAH : Tidak Ada
- ALIYAH : Tidak Ada
- PONPES : Tidak Ada
- Perguruan Tinggi : Tidak Ada

3). Kursus-kursus : Tidak Ada

F. Lembaga Adat

- 1). Keberadaan Lembaga Adat : Ada
- 2). Simbol Adat : Ada (berupa barang-barang Pusaka)
- 3). Jenis Kegiatan Adat : Ada

G. Lembaga Keamanan

1). Hansip dan Linmas

- Keberadaan Hansip dan Linmas : Ada
- Jumlah Anggota : 2 Orang
- Pelaksanaan Siskamling : Tidak Aktif
- Jumlah Pos Kamling : 8 Unit

2). Kerjasama Desa dengan TNI/POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS

- Mitra Koramil/TNI : Ada
- Jumlah Anggota : 2 Orang
- Jumlah Kegiatan : -

3). Satpam Swakarsa : Tidak Ada

2. Prasarana dan Sarana di Desa Tumingki

A. Prasarana dan Sarana Transportasi

1). Prasarana Transportasi Darat

a. Jalan Desa :

- Panjang Jalan Rabat Beton : 5 Km
- Kondisi : Baru Perbaikan
- Panjang Jalan ke Kebun : 1000 M
- Kondisi : Baru Perbaikan



Gambar 3.9 Jalan Desa Menuju Balai Haruyan



Gambar 3.10 Jalan Desa Keluar dari Desa Tumingki



Gambar 3.11 Papan Arah ke Desa Tumingki

- b. Jalan Kecamatan yang melewati Desa : Tidak Ada
 - c. Jalan Kabupaten yang melewati Desa : Tidak Ada
 - Panjang Jalan Aspal : Tidak Ada
 - d. Jalan Propinsi yang melewati Desa : Tidak Ada
 - e. Jalan Negara yang melewati Desa : Tidak Ada
 - f. Jembatan Desa:
 - Jumlah Jembatan Beton : Tidak Ada
 - Jumlah Jembatan Besi : Tidak Ada
 - Jumlah Jembatan Kayu : 10 Unit
 - Kondisi : Baru
 - g. Prasarana Angkutan Darat:
 - Jumlah Pangkalan Ojeg : Tidak Ada
 - Jumlah Terminal : Tidak Ada
- 2). Sarana Transportasi Darat
- Bus Umum : Tidak Ada
 - Truck : Tidak Ada
 - Angdes : Tidak Ada

- Elf/Mikro Bus : Tidak Ada
- Colt Bak : Tidak Ada
- Mini Bus : Tidak Ada
- Ojeg Motor : Tidak Ada
- Becak : Tidak Ada
- Delman : Tidak Ada

B. Prasarana Komunikasi dan Informasi

1) Telepon

- Telepon Umum : Tidak Ada
- Wartel : Tidak Ada
- Warnet : Tidak Ada
- HP : Ada
- Sinyal HP : Kurang Bagus

- Kantor POS

- Kantor POS : Tidak Ada
- Kantor POS Pembantu : Tidak Ada
- Tukang/Karyawan POS : Tidak Ada

- Radio / TV

- TV Umum : Tidak Ada
- TV Pribadi : Ada
- Radio Desa : Tidak Ada
- Radio Pribadi : Ada
- Parabola Umum : Tidak Ada
- Parabola Pribadi : Ada

- Koran / Majalah / Buletin

- Koran/Surat Kabar : Tidak Ada
- Majalah : Ada

2) Papan Iklan : Tidak Ada

- Papan Pengumuman : Tidak Ada

C. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

- Prasarana Air Bersih

- Sumur Pompa : Tidak Ada
- Sumur Gali : Tidak Ada
- Hidran Umum : Tidak Ada
- PAH : Tidak Ada
- Tangki Air Bersih : Ada, 1 Unit
- Embung : Tidak Ada
- Mata Air : Ada, ± 4 Titik
- Bangunan Pengolah Air Bersih : Tidak Ada
- Bangunan Pengolah Air Minum : Tidak Ada

- Sanitasi

- Saluran Drainase/SPAL : Tidak Ada
- Sumur Serapan : Tidak Ada
- MCK Umum : Ada
- Jamban Keluarga : Tidak Ada

D. Prasarana dan Kondisi Irigasi

- Saluran Primer : Tidak Ada
- Saluran Sekunder : Tidak Ada
- Saluran Tersier : Tidak Ada
- Pintu Sadap : Tidak Ada
- Pintu Pembagi Air : Tidak Ada

E. Prasarana dan Sarana Pemerintahan

- Prasarana dan Sarana Pemerintah Desa

- Gedung Kantor : Ada
- Kondisi : Baik
- Jumlah Ruang Kerja : 4 Ruang
- Balai Desa : 1 Unit

- Listrik : Tidak Ada
- Air Bersih : Ada
- Telepon : Tidak Ada
- Rumah Dinas Kades : Tidak Ada
- Rumah Dinas Sekdes : Tidak Ada
- Rumah Dinas Perangkat : Tidak Ada



Gambar 3.12 Gedung Kantor Desa Tumingi

3) Inventaris dan Alat Tulis Kantor

- Jumlah Mesin Tik : 1 Unit
- Jumlah Meja : 7 Buah
- Jumlah Kursi Kerja : 7 Buah
- Jumlah Kursi Rapat : 20 Buah
- Jumlah Lemari : 2 Buah
- Jumlah Komputer : 1 Unit
- Jumlah Mesin Fax : Tidak Ada
- Jumlah Kendaraan Dinas : 2 Unit

4) Administrasi Pemerintah Desa

- Buku Perdes : Ada
- Buku Keputusan Kepala Desa : Ada

- Buku Administrasi Kependudukan : Ada
- Buku Data Inventaris : Ada
- Buku Data Aparat : Ada
- Buku Data Tanah : Ada
- Buku Administrasi Pajak & Retribusi : Ada
- Buku Laporan Pengaduan Masyarakat : Ada
- Buku Agenda Ekpedisi : Ada
- Buku Profil Desa : Ada
- Buku Data Induk Penduduk : Ada
- Buku Data Mutasi Penduduk : Ada
- Buku Rekap Jumlah Penduduk Akhir Bulan : Ada
- Buku Registrasi Pelayanan Penduduk : Ada
- Buku Data Penduduk Sementara : Ada
- Buku Anggaran Penerimaan Uang : Ada
- Buku Anggaran Pengeluaran Uang : Ada
- Buku Kas Umum : Ada
- Buku Kas Pembantu Penerimaan Uang : Ada
- Buku Kas Pembantu Pengeluaran Uang : Ada
- Buku Data Lembaga Kemasyarakatan : Ada

5) Prasarana dan Sarana BPD

- Gedung Kantor BPD : Menumpang
- Kondisi : -
- Ruang Kerja : Ada
- Balai Pertemuan BPD : Tidak ada
- Listrik : Tidak Ada
- Air Bersih : Ada
- Telepon : Tidak Ada
- Rumah Dinas Ketua BPD : Tidak Ada
- Rumah Dinas Anggota BPD : Tidak Ada

F. Prasarana dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa

- LPM

- Kantor LPM : Menumpang
- Peralatan Kantor (komputer, dll) : Tidak Ada
- Mesin Tik : Tidak Ada
- Kardek : Tidak Ada
- Buku Administrasi LPM : Ada
- Meja Kerja : Tidak Ada
- Kursi Kerja : Tidak Ada
- Buku Kegiatan LPM : Ada

- PKK

- Kantor/Ruang PKK : Ada
- Peralatan Kantor (komputer, dll) : Tidak Ada
- Mesin Tik : Tidak Ada
- Kardek : Tidak Ada
- Buku Administrasi PKK : Ada
- Meja Kerja : Ada
- Kursi Kerja : Ada
- Buku Kegiatan PKK : Ada
- Buku Kepengurusan PKK : Ada
- Jumlah Kegiatan PKK : 12 Kali / Tahun.

- Karang Taruna

- Kepengurusan : Tidak Ada, Tidak Aktif
- Buku Administrasi : Ada
- Jumlah Kegiatan : Sesuai Kebutuhan.

- Rukun Tetangga (RT)

- Kepengurusan : Ada, Tidak Aktif
- Buku Administrasi : Ada
- Jumlah Kegiatan : Sesuai Kebutuhan.

- Lembaga Adat

Balai Adat

: Ada 3 (Tiga) Balai Adat.

1 Balai Adat berada di dusun Aitih (lihat Gambar 3.1) Damangnya Bapak Tanda, tidak pernah ada bantuan dari pemerintah selain dari dana desa sendiri. 1 Balai di dusun Haruyan (lihat Gambar 3.2) Damangnya bernama Bapak Apau, pernah dibantu oleh Dinas Pariwisata sebanyak Rp. 20 Juta yang hanya cukup untuk rehap atap balai saja. 1 Balai di dusun Tanginau (lihat Gambar 3.3) Damangnya Bapak Amban, pernah direhap dari dana desa sendiri sebanyak Rp. 20 Juta untuk perbaikan atap balai.

Kepengurusan

: Ada

Buku Administrasi

: Tidak Ada

Jumlah Kegiatan

: Sesuai Kebutuhan

- BUMDES

Gedung/Kantor

: Tidak Ada

Kepengurusan

: Tidak Ada

Buku Administrasi

: Tidak Ada

Jumlah Kegiatan

: - Bulan sekali.

G. Prasarana Peribadatan

- Jumlah Mesjid

: 1 Tempat (Mesjid Sabilal Muhtadin)

- Jumlah Musholla

: 3 Tempat



Gambar 3.13 Mushalla yang berada di Tumingki 2, Merupakan Hibah dari Satu-Satunya Keluarga yang Beragama Islam.



Gambar 3.14 Keadaan Ruang Mushalla di Tumingki 2

Mushalla ini merupakan hibah dari warga yang merupakan satu-satunya warga muslim di Tumingki 2 baik tanah maupun bahan bangunannya. Pada tahun 2014 pernah dibantu oleh Kesra Pemkab. HSS berupa hambal dan perlengkapan shalat



Gambar 3.15 Mushalla di Tumingki 1



Gambar 3.16 Mushalla di Lambuk

- Jumlah Pesantren : Tidak Ada
- Jumlah Tempat Pengajian : Tidak Ada (Hanya di Mushalla)
- Jumlah Majelis Ta'lim : 4 Tempat
- Jumlah Rumah Dai, Ustad : 1 buah dari kerjasama MUI dan BAZNAS. Dai berasal dari luar Tumingki ada 1 orang di Lambuk

- Jumlah Gereja : 2 Tempat (GBI Pantai Binuang/Gosen dan GBI Tanginau)



Gambar 3.17 Gereja GBI Pantai Binuang/Gosen

H. Prasarana Olah Raga

- Lapangan Sepak Bola : Tidak Ada
- Lapangan Volly : 1 Buah
- Lapangan Bulu Tangkis : 2 Buah
- Meja Pingpong/Tenis : Tidak Ada -
- Lapangan Golf : Tidak Ada
- Pacuan Kuda : Tidak Ada
- Arum Jeram : Tidak Ada
- Lapangan Basket : Tidak Ada
- Pusat Kebugaran : Tidak Ada
- Gelanggang Remaja : Tidak Ada -
- Tempat Catur : 2 Buah

I. Prasarana dan Sarana Kesehatan

- Prasarana Kesehatan

* Rumah Sakit Umum	: Tidak Ada
* Puskesmas	: Tidak Ada
* Puskesmas Pembantu	: Tidak Ada
* Poliklinik/Balai Pengobatan	: Tidak Ada
* Apotek	: Tidak Ada
* Posyandu	: 2 Lokasi (Menumpang)
* Toko Obat	: Tidak Ada
* Balai Pengobatan Masyarakat	: Tidak Ada
* Gedung penyimpanan Obat	: Tidak Ada
* Jumlah Rumah/Kantor Prektek Dokter	: Tidak Ada
* Rumah Bersalin	: Tidak Ada
* Balai Pengobatan Ibu dan Anak	: Tidak Ada
* Rumah Sakit Mata	: Tidak Ada
* Polindes/Poskesdes	: 1 Unit

- Sarana Kesehatan

* Jumlah Dokter Umum	: -
* Jumlah Dokter Gigi	: -
* Jumlah Dokter Spesialis	: -
* Jumlah Paramedis	: -
* Jumlah Dukun Bersalin	: -
* Jumlah Bidan (Bides)	: 1 Orang
* Jumlah Perawat	: -
* Dukun Pengobatan Alternatif	: -
* Jumlah Dokter Praktek	: -
* Laboratorium Kesehatan	: -

Di desa Tumingki terdapat 159 Rumah Tangga sesuai dengan data yang didapat Dinas Kesehatan, yang pernah di survey Tahun 2016 ada 120 Rumah Tangga, hasil dari survey tersebut ditemukan masih rendahnya PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang terdiri dari 10 indikator yaitu: Persalinan dengan bidan ahli, ASI eksklusif, Rutin menimbang berat bayi, Menggunakan air bersih, Cuci tangan pakai sabun, Jamban sehat, Pemberantasan jentik nyamuk, Makan buah dan sayur,

Aktifitas fisik dan Tidak merokok dalam rumah. Dari 120 Rumah Tangga yang di survey hanya 2 keluarga yang memenuhi PHBS dengan memenuhi 10 indikator tersebut. Yang paling rendah indikatornya yaitu tidak terpenuhi jamban sehat dan persalinan.

Upaya dari Dinas untuk membantu persalinan diadakannya rumah singgah untuk bersalin bagi desa-desa yang jauh dari Poskesdes. Dukun kampung yang terdaftar dan mau membawa pasien ke bidan Puskesmas atau Puskesmas akan mendapatkan *reward* (honor Rp. 150.000). cuci tangan pakai sabun masih rendah, lebih tinggi dari tidak merokok dalam rumah).



Gambar 3.18 Gedung POSKESDES Tumungki

J. Prasarana dan Sarana Pendidikan

- Gedung Kampus PTN : Tidak Ada
- Gedung kampus PTS : Tidak Ada
- Gedung SMA/Sederajat : Tidak Ada
- Gedung SMP/Sederajat : Tidak Ada
- Gedung SD/Sederajat : 2 dari Dana Dinas Pendidikan. SDN Tumungki 1 sudah ada perbaikan, sedangkan SDN Tumungki 2 belum ada renovasi dengan bangunan yang kurang terawat.

- Gedung KB / TK : 2 Unit. 1 Ruang (Menumpang) dari Alokasi Dana Desa (ADD), begitu juga untuk honor para gurunya menggunakan dari dana desa tersebut.
- Gedung RA : Tidak Ada
- Gedung MD : Tidak Ada -
- Jml. Lembaga Pend. Agama : Tidak Ada -
- Jml. Perpustakaan Keliling : Tidak Ada
- Perpustakaan Desa : Tidak Ada
- Taman Bacaan : Tidak Ada

K. Prasarana Energi dan Penerangan

- Listrik PLN : Tidak Ada
- Diesel Umum : Tidak Ada
- Genset Pribadi : Ada (Sewaktu-waktu)
- Lampu Minyak : Ada (6 Rumah)
- PL. Tenaga Surya : 10 Buah bantuan dari Dinas.
- Kayu Bakar : Tidak Ada
- Batu Bara : Tidak Ada
- Tanpa Penerangan : Iya

L. Prasarana Hiburan dan Wisata

- Jumlah Tempat Wisata : Puncak Gunung dan Air Terjun Tanginau yang belum diberi fasilitas umum (masih alami yang dijaga oleh masyarakat sekitar).
- Hotel : -
- Diskotik : -
- Bilyard : -
- Karaoke : -
- Museum : -
- Restoran : -
- Bioskop : -

M. Prasarana dan Sarana Kebersihan

- Tempat Pembuangan Sementara (TPS) : -
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) : -
- Alat Penghancur Sampah : -
- Jumlah Gerobak Sampah : -
- Jumlah Tong Sampah : -
- Jumlah Truk Pengangkut Sampah : -
- Jumlah Satgas Kebersihan : -
- Jumlah Anggota Satgas Kebersihan : -
- Jumlah Pemulung : -
- Tempat Pengelolaan Sampah : -
- Pengelola Sampah Lingkungan/RT : Tidak Ada
- Pengelola Sampah Lainnya : -

(Sampah di Desa Tumingki di buang/dibakar/dikubur oleh masing-masing warga bersama Satgas Desa yang ditunjuk oleh Desa di setiap RT masing-masingnya).

N. Bedah Rumah : Tahun 2015 ada 12 rumah.

O. Pembinaan Generasi Muda : Tidak ada

D. Strategi Dalam Upaya Meningkatkan Potensi Desa Terhadap Pelestarian dan Revitalisasi *Traditional Wisdom* Serta *Local Knowledge*.

Dari deskripsi yang sudah dipaparkan pada dapat difahami tentang usaha masyarakat desa telah berkontribusi terhadap pelestarian alam secara turun temurun bahkan didukung oleh kepercayaan yang mereka anut yang selaras dengan konsep ekoreligi. Hal-hal kepercayaan dan ritualnya merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara sederhana yang berbasis masyarakat, dan apa yang telah masyarakat lakukan haruslah tetap didukung dan dikawal dari kejahatan ekspansi industri kehutanan, perkebunan, dan pertambangan dalam skala besar yang dapat merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem di desa Tumingki sendiri.

Telah banyak contoh dimana daerah hutan rusak karena nafsu manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab, bahkan telah ada Bumi Kalimantan sendiri, sehingga jangan sampai Bumi Meratus khususnya Loksado menjadi contoh berikutnya.

Dalam era globalisasi, memang tidak bisa dielakkan bahwa sebuah budaya juga bersifat dinamis, sehingga kekayaan dan keragaman jenis flora-fauna, kelestarian dan keamanan hutan, kehidupan yang penuh kesederhanaan, upacara-upacara adat bahkan hukum adat sekalipun bisa saja suatu saat tergerus oleh budaya luar yang bersifat destruktif dan *me-replace* kebudayaan yang masih terjaga sampai hari ini. Untuk tetap mempertahankan budaya pelestarian dan revitalisasi *traditional wisdom* serta *local knowledge* di Desa Tumingki Kecamatan Loksado, perlu adanya sinergisitas semua pihak untuk mengawal hajat bersama tersebut dengan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Peneliti bersama dengan *stake holders* desa dan masyarakat merumuskan serta memetakan kembali potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan seperti jenis tanaman pangan, tanaman apotek hidup, dan perkebunan yang bisa menjadi komoditi unggulan di daerah Desa Tumingki dengan hasil rekomendasi kepada pihak instansi yang terkait dan memiliki wewenang untuk membantu setiap rumusan rekomendasi.
2. Membentuk dan membimbing komunitas pembelajaran sosial budaya pada masyarakat terasing dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan masyarakat terasing.
3. Membentuk dan membimbing komunitas pemberdayaan ekonomi masyarakat terasing sebagai mekanisme kontrol harga dan akses pasar hasil-hasil sektor perekonomian desa yang berkeadilan menuju masyarakat desa yang sejahtera.
4. Mengarahkan komunitas masyarakat terasing untuk bekerjasama dengan dinas terkait untuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, wisata, dan lainnya.
5. Mendampingi komunitas masyarakat terasing untuk memohon pendidikan dan pelatihan yang komprehensif kepada instansi terkait dari semua sektor perekonomian masyarakat desa dengan tujuan mencerdaskan masyarakat terasing.
6. Merencanakan dan melakukan aksi-aksi kolektif penyelamatan dan pengelolaan hutan secara sistematis dan berkala dengan komunitas masyarakat terasing.
7. Membantu komunitas masyarakat terasing dalam memetakan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dalam bentuk perlindungan dan pengawetan sumber daya hayati yang beranekaragam serta peningkatan pemanfaatan sifat-sifat genetisnya untuk berbagai kepentingan.

8. Mengarahkan komunitas masyarakat terasing untuk bekerjasama dengan *stakeholders* dalam menciptakan kenyamanan lingkungan (*amenities*) seperti ekowisata dan ekoreligi dengan dibangunnya fasilitas pengunjung yang memadai dan aman.
9. Mendampingi komunitas masyarakat terasing dalam pembangunan hidrologis untuk pengaturan tata air (irigasi), pengendalian erosi dan kekeringan di musim kemarau, baik dengan dana swadaya masyarakat maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
10. Mendampingi komunitas masyarakat terasing dalam membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan tenaga surya yang dapat memberikan penerangan gratis, baik dengan dana kerjasama atau dari pemerintah maupun dari dana swadaya.
11. Melakukan penyadaran kepada masyarakat terasing tentang pertambangan yang sembarangan akan berdampak merusak dan menghancurkan keanekaragaman hayati yang ada di desa, dan kerusakan yang diakibatkan tidak sebanding dengan janji-janji keuntungan dari investor tambang yang akan didapatkan masyarakat.
12. Mengenalkan klimatologis kepada masyarakat, seperti dalam bentuk pencegahan pemanasan global melalui fiksasi karbon (*carbon sequestration*) dan gas rumah kaca lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari penelitian terlihat bahwa potensi sumber daya manusia (SDM) dinyatakan lemah sehingga perlu perhatian khusus untuk taraf pendidikan yang lebih baik demi generasi masyarakat terasing di desa Tumingki tersebut, ini menjadi tugas bersama khususnya pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten sebagai bagian dari wilayah administrasi.

Begitu juga dengan potensi prasarana dan sarana yang kurang diperhatikan oleh pemerintah secara merata, kendala yang di dapat memang tidak mudah dengan situasi dan kondisi di daerah hutan pegunungan seperti desa Tumingki, namun dengan kerjasama semua pihak maka peningkatan SDM sebagai penjaga dan pemberdaya Sumber Daya Alam (SDA) dapat maksimal tanpa harus mengorbankan alam.

Dari deskripsi yang sudah dipaparkan pada dapat difahami tentang usaha masyarakat desa telah berkontribusi terhadap pelestarian alam secara turun temurun bahkan didukung oleh kepercayaan yang mereka anut yang selaras dengan konsep ekoreligi. Hal-hal kepercayaan dan ritualnya merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara sederhana yang berbasis masyarakat, dan apa yang telah masyarakat lakukan haruslah tetap didukung dan dikawal dari kejahatan ekspansi industri kehutanan, perkebunan, dan pertambangan dalam skala besar yang dapat merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem di desa Tumingki sendiri.

Dalam era globalisasi, memang tidak bisa dielakkan bahwa sebuah budaya juga bersifat dinamis, sehingga kekayaan dan keragaman jenis flora-fauna, kelestarian dan keamanan hutan, kehidupan yang penuh kesederhanaan, upacara-upacara adat bahkan hukum adat sekalipun bisa saja suatu saat tergerus oleh budaya luar yang bersifat destruktif dan *me-replace* kebudayaan yang masih terjaga sampai hari ini. Untuk tetap mempertahankan budaya pelestarian dan revitalisasi *traditional wisdom* serta *local knowledge* di Desa Tumingki Kecamatan Loksado, perlu adanya sinergisitas semua pihak untuk mengawal hajat bersama tersebut dengan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Peneliti bersama dengan *stake holders* desa dan masyarakat merumuskan serta memetakan kembali potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan seperti jenis tanaman pangan, tanaman apotek hidup, dan perkebunan yang bisa menjadi komoditi unggulan di daerah Desa Tumingki dengan hasil rekomendasi kepada pihak instansi yang terkait dan memiliki wewenang untuk membantu setiap rumusan rekomendasi.

2. Membentuk dan membimbing komunitas pembelajaran sosial budaya pada masyarakat terasing dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan masyarakat terasing.
3. Membentuk dan membimbing komunitas pemberdayaan ekonomi masyarakat terasing sebagai mekanisme kontrol harga dan akses pasar hasil-hasil sektor perekonomian desa yang berkeadilan menuju masyarakat desa yang sejahtera.
4. Mengarahkan komunitas masyarakat terasing untuk bekerjasama dengan dinas terkait untuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, wisata, dan lainnya.
5. Mendampingi komunitas masyarakat terasing untuk memohon pendidikan dan pelatihan yang komprehensif kepada instansi terkait dari semua sektor perekonomian masyarakat desa dengan tujuan mencerdaskan masyarakat terasing.
6. Merencanakan dan melakukan aksi-aksi kolektif penyelamatan dan pengelolaan hutan secara sistematis dan berkala dengan komunitas masyarakat terasing.
7. Membantu komunitas masyarakat terasing dalam memetakan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dalam bentuk perlindungan dan pengawetan sumber daya hayati yang beranekaragam serta peningkatan pemanfaatan sifat-sifat genetisnya untuk berbagai kepentingan.
8. Mengarahkan komunitas masyarakat terasing untuk bekerjasama dengan *stakeholders* dalam menciptakan kenyamanan lingkungan (*amenities*) seperti ekowisata dan ekoreligi dengan dibangunnya fasilitas pengunjung yang memadai dan aman.
9. Mendampingi komunitas masyarakat terasing dalam pembangunan hidrologis untuk pengaturan tata air (irigasi), pengendalian erosi dan kekeringan di musim kemarau, baik dengan dana swadaya masyarakat maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
10. Mendampingi komunitas masyarakat terasing dalam membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan tenaga surya yang dapat memberikan penerangan gratis, baik dengan dana kerjasama atau dari pemerintah maupun dari dana swadaya.
11. Melakukan penyadaran kepada masyarakat terasing tentang pertambangan yang sembarangan akan berdampak merusak dan menghancurkan keanekaragaman hayati yang ada di desa, dan kerusakan yang diakibatkan tidak sebanding dengan janji-janji keuntungan dari investor tambang yang akan didapatkan masyarakat.

12. Mengenalkan klimatologis kepada masyarakat, seperti dalam bentuk pencegahan pemanasan global melalui fiksasi karbon (*carbon sequestration*) dan gas rumah kaca lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surjono, & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 1998. *Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Frederikus Fios. 2013. *Eko-Spiritualisme: Sebuah Keniscayaan Pada Era Kontemporer*. Humaniora. Vol.4 No.2, Hal. 1237-1246
- Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge: USA
- Hikam. 2000. *Kekerasan Negara, Militer, Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman
- Kartasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat – Memadukan Pertumbuhan dan*

Pemerataan. Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO,
Jakarta

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Selatan. 2015. *Potret Buram Penyelamatan Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan*. Di akses di <http://walhikasel.or.id/?p=318> pada tanggal 25 Desember 2016.

Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.

Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016

Pranarka dan Vidhyandika M. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies

Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

- Ras, J.J., 1968. *Hikayat Bandjar: A Study in Malay Historiography*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Robert Adams. 2003. *Social Work and Empowerment*. 3rd. New York: Palgrave Macmillan
- Saleh, M. Idwar. 1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah
- Sumodiningrat, G. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Skolimowski, H. (1992). *Living Philosophy: Eco-Philosophy as A Tree of Life*. London: Arkana/Penguins Books
- Sri Widayanti. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*. WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1
- Tim penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1978. *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan Kalimantan Selatan
- Tjilik Riwut. 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: NR Publishing

Yayasan Dalas Langit (YADAH). 2002. *Menggali
Kearifan di Kaki Meratus*. Banjarmasin: PT.
Grafika Wangi Kalimantan